

**PERSEPSI PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN DAN
AUDITOR MENGENAI *EXPECTATION GAP*:
STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Fakultas Ekonomika & Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

DUDY S. RAMDHANI
NIM. C2C606048

**FAKULTAS EKONOMIKA & BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2012**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Dudy S. Ramdhani
Nomor Induk Mahasiswa : C2C606048
Fakultas/Jurusan : Ekonomika & Bisnis /Akuntansi
Judul Skripsi : Persepsi Pemakai Laporan Keuangan dan Auditor Mengenai *Expectation Gap*: Studi Kasus di Kota Semarang
Dosen Pembimbing : Dr. Sugeng Pamudji, MSi., Akt

Semarang, 18 April 2012

Dosen Pembimbing,

Dr. Sugeng Pamudji, MSi., Akt
NIP. 194901241980011001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Dudy S. Ramdhani
Nomor Induk Mahasiswa : C2C606048
Fakultas/Jurusan : Ekonomika & Bisnis /Akuntansi
Judul Skripsi : Persepsi Pemakai Laporan Keuangan dan Auditor Mengenai *Expectation Gap*: Studi Kasus di Kota Semarang
Dosen Pembimbing : Dr. Sugeng Pamudji, MSi., Akt

Telah dinyatakan lulus ujian pada 18 April 2012

Tim Penguji,

1. Dr. Sugeng Pamudji, MSi., Akt
2. Anis Chariri, SE, MCom, PhD, Akt
3. Hj. Siti Mutmainah, SE, M.Si, Akt

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Dudy Slamet Ramdhani, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Persepsi Pemakai Laporan Keuangan dan Auditor Mengenai *Expectation Gap*: Studi Kasus di Kota Semarang, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 18 April 2012
Yang membuat pernyataan,

(Dudy Slamet Ramdhani)
NIM : C2C606048

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan persepsi antara pemakai laporan keuangan dan auditor terhadap *expectation gap* dalam isu auditor dan proses audit, isu peran auditor, isu kompetensi dan independensi, isu larangan KAP, dan isu komunikasi hasil audit.

Penelitian ini menggunakan *convenience sampling*, sampel dalam penelitian ini adalah staf perbankan, dosen akuntansi, mahasiswa akuntansi, dan auditor yang berpraktek sebagai akuntan publik di Semarang. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner yang kemudian data dianalisis dengan menggunakan uji anova *one way*.

Hasil penelitian adalah terdapat perbedaan persepsi antara pemakai laporan keuangan dan auditor terhadap *expectation gap* dalam isu auditor dan proses audit, isu peran auditor, isu kompetensi dan independensi, isu larangan KAP, dan isu komunikasi hasil audit.

Kata kunci : *expectation gap*, persepsi, auditor dan proses audit, peran auditor, kompetensi dan independensi, larangan pada KAP, dan komunikasi hasil audit.

ABSTRACT

This research aimed to examine whether or not there's a significant difference in perceptions between financial report users and auditors regarding the expectation gap on the issues of audit process, auditor's role, competence and independence, prohibition on public accounting firm, and audit results communication

This research used convenience sampling, the samples were bank staff, accounting lecturers, accounting students, auditors that practicing as public accountants located in Semarang. The questionnaire used in this research to collect data, and data were analyzed by using ANOVA one way test.

The results of this research show that there are differences in perceptions between financial report users and auditors regarding the expectation gap on the issues of audit process, auditor's role, competence and independence, prohibition on public accounting firm, and audit results communication.

Keywords : *expectation gap, perception, audit process, auditor's role, competence and independence, prohibition on public accounting firm., and audit results communication*

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

-MOTTO-

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki kehancuran suatu kaum, maka tidak ada yang sanggup mencegahnya, dan tidak ada perlindungan mereka selain dari Allah.

(Q.S. Ar -Ra'd : 11)

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu.

Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar
(Al-Baqarah : 153)

Tidak ada kesalahan,
tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan.
Seluruh peristiwa adalah anugrah yang diberikan
kepada kita untuk dipelajari
(Elisabeth Kubler-Ross)

-PERSEMBAHAN-

Ayahanda dan Ibunda tercinta Darto & Ety Nuryeti
Kakakku tersayang Arita A. Purwati

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Persepsi Pemakai Laporan Keuangan dan Auditor Mengenai *Expectation Gap*: Studi Kasus di Kota Semarang”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu membantu perjuangan beliau dalam menegakkan Dinullah di muka bumi ini. Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingganya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Mohamad Nasir, MSi.,Akt.,PhD. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang dan Dosen Wali yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan masukan yang bermanfaat.
2. Bapak Dr. H. Sugeng Pamudji, MSi., Akt., selaku Dosen Pembimbing penulis yang sabar membimbing, dan berbagi ilmu dengan penulis.
3. Seluruh Dosen Pengajar, Staf, serta karyawan atas pengabdianya pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
4. Akuntan Pendidik, Auditor, Staff Perbankan, dan Mahasiswa yang telah bersedia menjadi responden penelitian.

5. Ayahanda Darto dan Ibunda Ety Nuryeti yang terkasih dan tersayang. Do'a dan dukungan kalian adalah semangat yang luar biasa bagi penulis dalam menjalani kehidupan di dunia ini.
6. Kakakku tersayang Arita A. Purwati dan keponakan-keponakanku Ila Ale.yang lucu-lucu. Dukungan dan senyuman kalian sangat berarti bagi penulis, mari kita berjuang demi kebahagiaan kedua orang tua kita.
7. Bidadariku tercinta Firmalia Novi L. yang sudah menemani hari-hari penulis, menjadi bagian dalam hidup penulis, memberi dukungan yang luar biasa, serta menjadi semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Mbak Uki, Mas Agus dan Eromondo untuk pelajaran, kesediaan waktu dan tempat, serta menu kerangnya yang selalu menemani malam-malam galau penulis dalam menyusun skripsi.
9. Saudara-saudaraku tercinta di Cirebon, Bandung, dan saudara-saudara di kota perantauan lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu atas dukungan dan doanya.
10. Firman Si Raja Kentut Aroma Terapi dan Keluarga besar di Gombel, yang senantiasa menemani penulis bermain RC Helicopter di lapangan luas ketika penulis sedang penat dan jenuh dalam menyusun skripsi. Semangat!

Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan memberikan sumbangsih kepada Universitas Diponegoro.

Semarang, 18 April 2012

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAKSI	v
ABSTRACT	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
 BAB II TELAAH PUSTAKA	 10
2.1. Landasan Teori	10
2.1.1. Teori Agensi	10
2.1.2. Persepsi	11
2.1.3. Auditing	13
2.1.4. <i>Expectation Gap</i>	16
2.1.5. Auditor & Proses Audit	20
2.1.5.1. Auditor	20
2.1.5.2. Proses Audit	22
2.1.6. Peran Auditor	26

2.1.7.	Kompetensi dan Independensi Auditor	29
2.1.7.1.	Kompetensi.....	29
2.1.7.2.	Independensi.....	30
2.1.8.	Larangan KAP	32
2.1.9.	Komunikasi Hasil Audit.....	36
2.2.	Review Penelitian Terdahulu.....	43
2.3.	Kerangka Pemikiran Teoritis.....	45
2.3.1.	Persepsi antara Pemakai Laporan Keuangan, Auditor, Akuntan Pendidik, dan Mahasiswa Akuntansi terhadap <i>Expectation Gap</i> dalam Isu Auditor dan Proses Audit.....	45
2.3.2.	Persepsi Antara Pemakai Laporan Keuangan, Auditor, Akuntan Pendidik, dan Mahasiswa Akuntansi Terhadap <i>Expectation Gap</i> dalam Isu Peran Auditor	47
2.3.3.	Persepsi Antara Pemakai Laporan Keuangan, Auditor, Akuntan Pendidik, dan Mahasiswa Akuntansi Terhadap <i>Expectation Gap</i> dalam Isu Kompetensi & Independensi Auditor	48
2.3.4.	Persepsi Antara Pemakai Laporan Keuangan, Auditor, Akuntan Pendidik, dan Mahasiswa Akuntansi Terhadap <i>Expectation Gap</i> dalam Isu Larangan Pada KAP	49
2.3.5.	Persepsi Antara Pemakai Laporan Keuangan, Auditor, Akuntan Pendidik, dan Mahasiswa Akuntansi Terhadap <i>Expectation Gap</i> dalam Isu Komunikasi Hasil Audit.....	50
BAB	III METODE PENELITIAN.....	52
3.1.	Jenis dan Desain Penelitian	52
3.2.	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	53

3.3.	Populasi dan Sampel.....	60
3.4.	Jenis Data.....	61
3.5.	Metode Pengumpulan Data	62
3.6.	Metode Analisis Data	64
3.5.1.	Analisis Indeks Jawaban Responden.....	65
3.5.2.	Analisis Variansi One Ways Anova	65
BAB	IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	69
4.1.	Deskripsi Objek Penelitian	69
4.2.	Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas	72
4.2.1	Hasil Uji Validitas	72
4.2.2	Hasil Uji Reliabilitas	75
4.3.	Hasil Analisis Indeks Jawaban Responden	75
4.4.	Hasil Analisis Variansi One Ways Anova.....	88
4.4.1.	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	88
4.4.2.	Hasil Uji Hipotesis.....	89
4.5.	Pembahasan	94
BAB	V PENUTUP	104
5.1.	Kesimpulan.....	104
5.2.	Implikasi Penelitian	105
5.3.	Keterbatasan Penelitian	105
5.4.	Agenda Penelitian Mendatang.....	106
DAFTAR PUSTAKA		107
LAMPIRAN		110

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Response Rate Responden	69
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	70
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	71
Tabel 4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	71
Tabel 4.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja	72
Tabel 4.6	Hasil Uji Validitas	73
Tabel 4.7	Hasil Uji Reliabilitas	75
Tabel 4.8	Tanggapan Responden Mengenai Isu Auditor dan Proses Audit.	76
Tabel 4.9	Tanggapan Responden Mengenai Peran Auditor	78
Tabel 4.10	Tanggapan Responden Mengenai Isu Kompetensi dan Independensi	80
Tabel 4.11	Tanggapan Responden Mengenai Larangan KAP	84
Tabel 4.12	Tanggapan Responden Mengenai Komunikasi Hasil Audit.....	86
Tabel 4.13	Hasil Uji Normalitas	88
Tabel 4.14	Hasil Uji Homogenitas	89
Tabel 4.15	Hasil Uji F	90
Tabel 4.16	Hasil Uji t.....	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar	2.1	Kerangka Pemikiran Teoritis	51
--------	-----	-----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntan publik adalah seorang praktisi dan gelar professional yang diberikan kepada akuntan di Indonesia yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk memberikan jasa audit umum dan *review* atas Laporan Keuangan, audit kinerja dan audit khusus serta jasa dalam bidang non-atestasi lainnya seperti jasa konsultasi, jasa kompilasi, dan jasa-jasa lainnya yang berhubungan dengan Akuntansi dan Keuangan.

Profesi akuntan publik dikenal oleh masyarakat dari jasa audit yang disediakan bagi pemakai informasi keuangan. Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik di suatu Negara sejalan dengan berkembangnya perusahaan yang berkembang dalam suatu Negara masih berskala kecil dan masih menggunakan modal pemiliknya sendiri untuk membelanjai usahanya, jasa audit yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik belum diperlukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Begitu juga jika sebagian besar perusahaan berbadan hukum selain perseroan terbatas (PT) yang bersifat terbuka, di Negara tersebut jasa audit profesi akuntan publik belum diperlukan oleh masyarakat (Mulyadi, 2002)

Kebutuhan informasi mengenai laporan keuangan suatu perusahaan semakin tinggi, sehingga akuntan publik dituntut untuk melakukan salah satu tugasnya yaitu memberikan jasa audit terhadap laporan keuangan perusahaan.

Laporan ini tidak hanya berpengaruh dan dipakai oleh manajemen perusahaan saja tetapi juga oleh masyarakat luas. Manajemen perusahaan bertanggung jawab atas laporan keuangan perusahaan, sedangkan akuntan publik (auditor) bertanggung jawab atas opini audit dari jasa audit yang dilakukan. Opini audit inilah yang akan digunakan oleh masyarakat luas seperti investor dan perusahaan lain untuk menilai bagaimanakah aliran dana di dalam perusahaan tersebut. Opini audit ini juga yang akan menjadi masukan dan pembanding bagi para investor untuk menginvestasikan modalnya ke suatu perusahaan.

Pihak-pihak diluar perusahaan memerlukan informasi mengenai perusahaan untuk pengambilan keputusan tentang hubungan mereka dengan perusahaan. Umumnya mereka mendasarkan keputusan mereka berdasarkan informasi yang disajikan oleh manajemen dalam laporan keuangan perusahaan. Dengan demikian, terdapat dua kepentingan yang berlawanan dalam situasi seperti yang diuraikan di atas. Di satu pihak, manajemen perusahaan ingin menyampaikan informasi mengenai pertanggungjawaban pengelolaan dana yang berasal dari pihak luar, di pihak lain, pihak luar perusahaan ingin memperoleh informasi yang andal dari manajemen perusahaan mengenai pertanggungjawaban dana yang mereka investasikan. Manajemen perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga agar pertanggungjawaban keuangan yang disajikan untuk pihak luar dapat dipercaya, sedangkan pihak luar perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan dapat dipercaya sebagai dasar keputusan-keputusan yang diambil oleh mereka. Tanpa menggunakan jasa

auditor independen, manajemen perusahaan tidak akan dapat meyakinkan pihak luar perusahaan bahwa laporan keuangan yang disajikan berisi informasi yang dapat dipercaya, karena dari sudut pandang pihak luar, manajemen perusahaan mempunyai kepentingan, baik kepentingan keuangan maupun kepentingan yang lain.

Adanya kebutuhan akan jasa pihak ketiga untuk menilai keandalan pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh manajemen dalam laporan keuangannya, maka timbul kebutuhan akan jasa profesi akuntan publik. Akuntan publik diharapkan mampu memberikan penilaian yang bebas tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Senada dengan pernyataan ini, Guy & Sullivan (1988) mengemukakan bahwa publik dan pemakai laporan keuangan mempunyai harapan tinggi terhadap peran dan tanggung jawab auditor untuk mengkomunikasikan informasi yang bermanfaat mengenai proses auditnya terhadap pemakai laporan keuangan dan juga mengkomunikasikan secara jelas dengan komite audit serta pihak-pihak lain yang berkepentingan atau bertanggung jawab terhadap pelaporan keuangan yang dapat dipercaya.

Apabila informasi yang diberikan oleh auditor tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya dan mengakibatkan kerugian pihak-pihak yang menggunakan informasi yang diberikan oleh auditor, tentu saja auditor harus mempertanggungjawabkannya kepada pihak-pihak tersebut. Sesuai dengan prinsip etika profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), profesi akuntan publik bertanggung jawab pada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan-rekan publik

dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, serta pihak lain yang bergantung kepada objektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib.

Ketidakmampuan auditor di dalam mengungkapkan dan menginformasikan kekeliruan dan ketidakberesan dapat mempengaruhi penilaian publik dan pemakai laporan keuangan terhadap kinerja auditor dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Kinerja auditor dapat diketahui dengan melihat kesuksesan mereka di dalam melaksanakan aktivitas-aktivitasnya dalam rangka melaksanakan tugas audit.

Saat ini, permasalahan yang terjadi mengenai peran auditor selalu menjadi perhatian utama di dalam dunia bisnis. Meningkatnya kasus-kasus hukum yang melibatkan akuntan publik, terutama mengenai penyelesaian tanggung jawabnya, membuat lembaga-lembaga penyusun standar akuntansi harus mulai berpikir keras untuk menyusun peraturan-peraturan yang memuat tugas dan tanggung jawab seorang auditor. Disamping itu semakin banyak pula kasus-kasus tuntutan terhadap auditor yang sampai ke meja hijau. Walaupun tidak sampai ke pengadilan, maka masyarakat memberi penilaian terhadap auditor, bahwa auditor tidak mampu melaksanakan tugasnya dan tidak dapat diharapkan untuk membantu publik.

Contoh kasus di dalam negeri terlihat dari akan diambilnya tindakan oleh Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) terhadap 10 Kantor Akuntan Publik yang melakukan pelanggaran, menyusul keberatan pemerintah

atas sanksi berupa peringatan plus yang telah diberikan. Sepuluh Kantor Akuntan Publik tersebut diindikasikan melakukan pelanggaran berat saat mengaudit bank-bank yang dilikuidasi pada tahun 1998 (Winarto, 2002). Selain itu terdapat kasus keuangan dan manajerial perusahaan publik yang tidak terdeteksi oleh akuntan publik yang menyebabkan perusahaan didenda oleh Bapepam (INVESTOR, Edisi 60, 7- 20 Agustus 2002). Kasus yang terjadi di luar negeri yang melibatkan perusahaan besar dan kantor akuntan publik besar juga menambah kasus yang mengarah pada mutu akuntan publik (Sunarsip, Kompas 15 Juli 2002). Kondisi tersebut merupakan wujud fenomena *expectation gap*, yaitu adanya kesenjangan harapan antara publik dan auditor terhadap peran dan tanggung jawab auditor (Humphrey, 1993).

Pengurangan *expectation gap* dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain adalah revisi peraturan-peraturan dan standar, negosiasi antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan audit atau dengan pendidikan (Gramling & Wallace, 1996). Pendidikan akuntansi khususnya pengajaran auditing diharapkan mampu mengakomodasi elemen-elemen materi pengajaran yang dapat mengurangi kesenjangan dalam hal peran dan tanggung jawab auditor.

Guy & Sullivan (1988) menyebutkan adanya perbedaan harapan publik dengan auditor dalam hal: (1) deteksi kecurangan dan tindakan ilegal, (2) perbaikan keefektifan audit, (3) komunikasi yang lebih intensif dengan publik dan komite audit. Dalam hal ini publik beranggapan bahwa auditor harus dapat memberikan jaminan (*absolut assurance*) terhadap laporan keuangan yang diaudit dan kemungkinan adanya kecurangan dan tindakan ilegal harus dapat

ditemukan dengan jaminan tersebut. Di lain pihak auditor tidak dapat memberikan *absolut assurance* tersebut, auditor hanya dapat memberikan *reasonable assurance* saja, dan inilah yang belum dimengerti oleh publik (Gramling & Wallace, 1996). Gramling & Wallace meneliti pendidikan, khususnya pengajaran auditing untuk mengurangi *expectation gap*. Mereka memberikan enam isu yang dimunculkan dalam penelitian itu yaitu peran dan tanggung jawab auditor terhadap: (1) auditor dan proses audit, (2) peran auditor terhadap klien audit dan laporan keuangan audit, (3) kepada siapa auditor harus bertanggung jawab, (4) aturan atas firma-firma akuntan publik, (5) atribut kinerja auditing, (6) kasus-kasus khusus. Isu ini sejalan dengan isu yang dikemukakan oleh Guy & Sullivan (1988) dan relevan untuk mengevaluasi kinerja auditor akhir-akhir ini. Penelitian ini ingin menguji apakah ada perbedaan persepsi antara pemakai laporan keuangan, auditor, akuntan pendidik, dan mahasiswa akuntansi terhadap *expectation gap*.

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dalam lingkup penelitian dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pada penelitian-penelitian sebelumnya antara lain penelitian yang dilakukan oleh Indrarto (2009) memfokuskan pada Isu Auditor & Proses Audit, Peran Auditor, serta Kompetensi dan Independensi Auditor. Sedangkan dalam penelitian ini ditambahkan isu larangan KAP dan komunikasi hasil audit yang merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Suatmaja (2004) dan Yuliati, dkk (2007).

Penelitian ini akan dilakukan untuk mencari tahu dan membandingkan persepsi antara staff perbankan, auditor, akuntan pendidik dan

mahasiswa akuntansi mengenai perbedaan harapan dalam isu auditor dan proses audit, peran auditor, kompetensi dan independensi auditor, larangan pada KAP, dan komunikasi hasil audit. Oleh sebab itu, penelitian ini berjudul **“Persepsi Pemakai Laporan Keuangan dan Auditor Mengenai *Expectation Gap*: Studi Kasus di Kota Semarang”**

1.2 Perumusan Masalah

Meningkatnya kasus-kasus hukum yang melibatkan akuntan publik, terutama mengenai penyelesaian tanggung jawabnya, membuat perlunya dilakukan evaluasi mengenai efisiensi dan efektivitas peran auditor, yang antara lain dapat diketahui dari ada tidaknya *expectation gap*. Berdasarkan keadaan ini, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan dalam rumusan pertanyaan: “Apakah terdapat perbedaan persepsi antara pemakai laporan dan auditor terhadap *expectation gap* dalam isu auditor dan proses audit, isu peran auditor, isu kompetensi dan independensi, isu larangan KAP, dan isu komunikasi hasil audit?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan persepsi antara pemakai laporan keuangan dan auditor terhadap *expectation gap* dalam isu auditor dan proses audit, isu peran auditor, isu kompetensi dan independensi, isu larangan KAP, dan isu komunikasi hasil audit.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah bukti empiris mengenai studi *expectation gap* sehingga Akuntansi Perilaku dan Auditing semakin berkembang.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan memberikan pengetahuan, informasi dan referensi *expectation gap* dalam isu auditor dan proses audit, isu peran auditor, isu kompetensi dan independensi, isu larangan KAP, dan isu komunikasi hasil audit, sehingga dapat disusun upaya-upaya untuk mengurangi *expectation gap* yang ada.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini. Mencakup landasan teori dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan tentang variabel penelitian dan definisi operasional penelitian, penentuan sampel penelitian, jenis dan sumber data, serta metode pengumpulan data dan metode analisis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan isi pokok dari penelitian yang berisi deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan sehingga dapat diketahui hasil analisis melalui hasil pengujian hipotesis.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian serta saran bagi penelitian berikutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Scott (1997) menyatakan dalam teori agensi muncul adanya pemisahan antara pemilik dengan manajemen. Pemilik atau pemegang saham sebagai prinsipal, sedangkan manajemen sebagai agen, dan ditambah dengan auditor sebagai pihak ketiga. Aplikasi teori agensi dapat terwujud dalam kontrak kerja yang mengatur tentang proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan manfaat secara keseluruhan. Inti dari teori agensi adalah pendesaian kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen dalam hal terjadinya pertentangan.

Menurut Boynton, dkk (2001), kebutuhan akan audit laporan keuangan diawali dengan adanya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*). Banyak pemakai laporan keuangan memberikan perhatian tentang adanya pertentangan kepentingan aktual ataupun potensial antara pemakai laporan keuangan sendiri maupun antara pemakai laporan keuangan dengan manajemen. Kekhawatiran ini berkembang menjadi ketakutan bahwa laporan keuangan beserta data yang menyertainya telah disusun sedemikian rupa oleh manajemen sehingga menjadi bias. Pertentangan kepentingan juga dapat terjadi diantara berbagai kelompok pemakai laporan keuangan sendiri, seperti kreditur dengan investor. Oleh karena

itu, para pemakai laporan keuangan mencari keyakinan dari pihak ketiga (auditor independen) untuk memastikan bahwa:

1. Laporan keuangan telah bebas dari bias untuk kepentingan manajemen
2. Laporan keuangan telah netral untuk kepentingan berbagai kelompok pemakai laporan keuangan

Kegagalan audit, skandal keuangan, dan tingginya kepercayaan yang diberikan kepada auditor, menimbulkan kesenjangan harapan dalam audit. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan harapan antara masyarakat pemakai jasa audit dengan auditor, mengenai peran dan tanggung jawab auditor dalam melaksanakan pekerjaannya. Kaplan (2004) menyatakan bahwa masyarakat pemakai jasa audit mempunyai harapan yang sangat tinggi mengenai fungsi auditor sebagai pengawas publik (*public watch dog*) bagi mereka. Dalam kenyataannya auditor sulit memenuhi fungsi tersebut, karena berbagai hambatan yang ada baik secara institusional maupun kultur organisasi.

2.1.2 Persepsi

Persepsi menurut Kotler (2006) adalah proses dimana seseorang memilih, mengorganisasi dan mengartikan masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang berarti dari dunia ini. Faktor utama dalam persepsi yaitu:

1. Stimulus faktor Yaitu faktor yang merupakan sifat fisik suatu obyek seperti ukuran, warna dan ketajaman.

2. Individual faktor. Yaitu faktor yang merupakan sifat-sifat individual yang tidak hanya meliputi proses, tetapi juga pengalaman diwaktu yang lampau pada hal yang sama. Dalam keadaan yang sama, persepsi seseorang terhadap produk dapat berbeda dengan persepsi orang lain.

Persepsi adalah proses memberikan makna pada stimulus indrawi. Seseorang melakukan suatu tindakan berdasarkan persepsi yang dimilikinya, sebagai akibatnya kualitas tindakan seseorang sangat tergantung pada ketepatannya dalam mempersepsikan suatu realitas. Baron & Greenberg dalam Kustono (2001) mendefinisikan persepsi sebagai proses di mana seseorang memilih, mengorganisasi dan menginterpretasi sesuatu dengan *senses* untuk memahami apa-apa yang ada di sekitarnya.

Elemen pembentuk persepsi, yaitu:

1. Informasi : dapat berupa benda fisik dan ada juga yang abstrak.
2. Rangsangan : rangsangan mendorong pikiran untuk menangkap dan mengolah informasi tersebut.
3. Proses pengolahan informasi : informasi yang diperoleh kemudian diolah untuk dikenali dan dimaknai. Proses ini meliputi pengorganisasian, penafsiran dan pengungkapan makna.

Persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Pearson (1992) menyatakan bahwa perbedaan persepsi disebabkan karena beberapa faktor berikut :

1. Faktor fisiologis, yaitu: tinggi, berat, gender, panca indra dan rasa lapar

2. Pengalaman dan peranan, yaitu apa yang telah dialami di masa lalu dan peranan seseorang yang diajak bicara.
3. Budaya, merupakan suatu sistem kepercayaan, nilai, kebiasaan dan perilaku yang digunakan dalam masyarakat tertentu.
4. Perasaan dan keadaan, misalnya hari baik atau buruk, menyenangkan atau tidak menyenangkan.

Perbedaan persepsi terhadap suatu hal dari individu atau kelompok yang berbeda dapat menimbulkan masalah. Hal ini dikarenakan persepsi yang berbeda akan menimbulkan tindakan atau respon yang berbeda pula. Demikian halnya pada apa yang dipersepsikan seorang individu dapat secara jelas berbeda dengan realitas yang terjadi dalam kenyataan. Berdasarkan isu-isu yang digunakan di dalam penelitian ini, maka persepsi staff perbankan, auditor, akuntan pendidik, dan mahasiswa akuntansi terhadap auditor dapat diartikan sebagai pemahaman yang mendalam akan auditor dan proses audit, peran auditor, kompetensi dan independensi, larangan pada KAP, serta komunikasi hasil audit sesuai dengan kebutuhan mereka. Pemahaman makna di antara para staff perbankan, auditor, akuntan pendidik, dan mahasiswa akuntansi mempunyai latar belakang yang berbeda-beda dan kemungkinan akan berlainan, hal inilah yang sering disebut dengan *expectation gap*.

2.1.3 Auditing

Menurut Boynton, dkk (2001), auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-

asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta penyampain hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Mulyadi (2002) memberikan pengertian auditing sebagai suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Arens dan Loebbecke (2003) mendefinisikan auditing sebagai proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud, dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh orang yang independen dan kompeten.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka auditing pada dasarnya merupakan proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan

kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Seseorang yang kompeten dan independen ini disebut dengan auditor.

Dalam perkembangannya, auditing sendiri dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu audit laporan keuangan, audit operasional, dan audit ketaatan. Audit laporan keuangan bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu yang pada umumnya berupa Prinsip-prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). Audit operasional adalah penelaahan atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitasnya. Sedangkan audit ketaatan bertujuan untuk mempertimbangkan apakah klien telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan pihak yang memiliki otoritas yang tinggi (Arens dan Loebbecke, 2003).

Masyarakat secara umum sering menganggap bahwa akuntansi dan auditing adalah suatu hal yang sama, karena sebagian besar kegiatan auditing berkaitan dengan informasi akuntansi dan para pelakunya adalah orang yang memiliki keahlian dalam bidang akuntansi. Padahal dalam kenyataannya, akuntansi dan auditing memiliki perbedaan yang mendasar. Akuntansi bertujuan untuk menyajikan informasi kuantitatif tertentu yang dapat digunakan oleh manajemen perusahaan dan pihak lainnya untuk mengambil keputusan masa depan yang tepat. Sedangkan di dalam auditing, yang menjadi pokok adalah menentukan apakah informasi akuntansi yang tercatat telah mencerminkan kejadian-kejadian ekonomi yang dialami perusahaan pada periode akuntansi tertentu. Persepsi masyarakat yang menganggap bahwa akuntansi dan auditing

merupakan hal yang sama mengungkapkan adanya audit *expectation gap*, seperti isu auditor dan proses audit, isu peran auditor, isu kompetensi dan independensi, serta isu kinerja auditor.

2.1.4 *Expectation Gap*

Istilah kesenjangan ekspektasi (*expectation gap*) dalam auditing pertama kali dipakai oleh Liggio (1974) dalam Gramling & Wallace (1996), yang mendefinisikan kesenjangan ekspektasi (*expectation gap*) sebagai perbedaan persepsi antara akuntan independen dengan pemakai laporan keuangan auditan mengenai tingkat kinerja yang diharapkan (*expected performance*) dari profesi akuntan. Istilah *expectation gap* dapat ditelusuri awal mula penggunaannya di AS pada tahun 1974 saat *American Institute Of Certified Publik Accountants* (AICPA) membentuk *Commision on Auditor's Responsibilities*, yang selanjutnya disebut sebagai *Cohen commision*. Komisi ini dibentuk untuk menanggapi kritik masyarakat mengenai kualitas kinerja auditor yang pada saat ini terdapat beberapa kasus yang memperhatikan bahwa auditor gagal mendeteksi kegagalan atau tindakan penyimpangan dari perusahaanperusahaan yang dimiliki publik. Komisi ini bertugas secara khusus memberikan rekomendasi tentang tanggung jawab auditor yang tepat (sesuai profesi).

Menurut *Cohen Commission*, para pemakai laporan keuangan audit biasanya mempunyai harapan yang masuk akal tentang kemampuan auditor dan keyakinan yang dapat diberikan oleh auditor. Hal ini memberikan gambaran bahwa *expectation gap* yang lebih disebabkan karena kegagalan profesi akuntan

publik untuk bereaksi dan berkembang agar tidak tertinggal oleh perubahan bisnis dan lingkungan sosial.

Expectation gap di dalam auditing adalah suatu fenomena yang terjadi karena adanya perbedaan persepsi tentang apa yang dipercaya oleh auditor yang menjadi tanggung jawabnya dengan apa yang dipercaya pemakai laporan keuangan mengenai tanggung jawab auditor yang sesungguhnya (Guy & Sullivan 1988, Gramling & Wallace 1996). Sedangkan menurut Yeni (2000) dan Hartadi (2000), yang dimaksud dengan *expectation gap* adalah perbedaan antara apa yang masyarakat dan pemakai laporan keuangan percayai atau harapkan dari auditor dengan apa yang auditor yakini menjadi tanggung jawabnya. Yang perlu ditekankan dalam *expectation gap* adalah harapan masyarakat atau para pemakai laporan keuangan terhadap auditor tentang laporan keuangan secara nyata melebihi peran auditor dan opini auditnya. Secara umum, *expectation gap* terdiri atas (Robert, 2004) :

1. *Reporting gap*, yaitu terdapat perbedaan persepsi antara auditor dengan publik mengenai apa yang harus dilaporkan auditor.
2. *Performance gap*, di mana apa yang dilakukan oleh auditor di bawah standar atau tidak sesuai dengan standar yang berlaku.
3. *Liability gap*, di mana terjadi perbedaan persepsi antara auditor dan publik mengenai kepada siapa auditor bertanggung jawab.

Porter (1993) mengemukakan bahwa *expectation gap* yang terjadi terdiri atas dua komponen utama, yaitu :

1. *Reasonableness gap*, yaitu perbedaan yang timbul karena pemahaman publik terhadap apa yang diinginkan oleh publik kepada auditor untuk dilakukan, dan apa yang seharusnya auditor lakukan.
2. *Performance gap*, yaitu perbedaan yang timbul akibat persepsi terhadap auditor dan hasil kinerja auditor, yang terdiri atas :
 - a. *Deficient standard gap*, di mana standar auditing yang ada tidak mencukupi atau tidak mencakup semua aspek-aspek di dalam auditing.
 - b. *Deficient performance gap*, di mana kinerja auditor tidak sesuai dengan harapan publik.

Kemudian Porter (1993) berdasarkan definisi di atas kemudian meneliti lebih lanjut dengan mengidentifikasikan berbagai peran auditor ke dalam komponen-komponen perbedaan di atas. Dengan mengetahui termasuk mana komponen tugas tersebut, maka tindakan-tindakan korektif atas kegagalan auditor dapat segera dilakukan. Hal ini ternyata membawa dampak positif bagi perkembangan profesi auditor karena mampu mempersempit *expectation-performance gap* antara publik dengan profesi auditor.

Di dalam peran auditor, kesenjangan harapan terjadi karena adanya pemahaman para pemakai laporan keuangan yang berbeda dengan auditor mengenai :

- a. Pelaksanaan audit

Selama ini para pemakai laporan keuangan memiliki pemahaman bahwa audit dilaksanakan dengan memeriksa keseluruhan transaksi dari suatu perusahaan, padahal audit dilakukan dengan memeriksa sistem dan sampel-

sampel transaksi dari laporan keuangan perusahaan tersebut yang dikategorikan sebagai material atau beresiko tinggi, yang bilamana terdapat adanya salah saji akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil.

b. Kualitas opini auditor

Opini auditor tidak menjamin bahwa penyajian laporan keuangan suatu perusahaan bebas dari salah saji material secara mutlak. Opini auditor hanya bisa memberikan suatu gambaran umum mengenai penyajian laporan keuangan yang bebas dari adanya salah saji yang material, sehingga dapat menambah keyakinan pemakai laporan keuangan tersebut terhadap reliabilitas laporan keuangan tersebut.

c. Opini auditor terhadap pengendalian internal organisasi dan kelangsungan hidup organisasi.

Opini yang dikeluarkan auditor tidak bisa dianggap sebagai ukuran cukup atau tidaknya efektivitas dan efisiensi dari suatu sistem pengendalian internal perusahaan, serta tidak bisa dianggap sebagai ukuran bahwa perusahaan akan berlangsung beroperasi terus-menerus.

Expectation gap merupakan suatu masalah bagi profesi akuntan publik yang senantiasa muncul dalam bidang auditing dan merupakan kendala bagi perkembangan profesi. Karena adanya *expectation gap* yang merugikan banyak pihak ini, maka berbagai usaha telah dilakukan untuk mengurangi adanya *expectation gap*. Menurut DeZoort & Barney (1991) bahwa jalur keluar untuk mengurangi tingkat *expectation gap* tidak terlepas dari bidang pendidikan akademis. Menurutnya auditor juga berfungsi sebagai akuntan pendidik dan

memiliki peran yang sangat penting. Selain dalam dunia pendidikan, cara lain yang digunakan untuk mengurangi *expectation gap* adalah (1) pendidikan dan pelatihan untuk klien komite audit mengenai keterbatasan-keterbatasan auditing, (2) menggunakan laporan lengkap yang berisi jaminan yang lebih luas agar publik dapat memahami dan mentaatinya.

2.1.5 Auditor & Proses Audit

2.1.5.1 Auditor

Auditing merupakan proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan (Arens & Loebbecke, 2000). Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang kompeten dan independen tersebut adalah auditor. Auditor dapat dibagi menjadi empat (Arens & Loebbecke, 2000) :

1. Akuntan publik terdaftar (auditor eksternal), adalah auditor independen yang bertanggung jawab atas laporan keuangan historis dari seluruh perusahaan publik dan perusahaan lainnya.
2. Auditor pemerintah, adalah auditor yang bekerja pada badan pemerintah seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Jendral (Itjen) pada departemen-departemen pemerintah. Tugasnya yaitu mengaudit laporan keuangan yang

dibuat oleh badan-badan pemerintah, dan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasi berbagai program dan proyek pemerintah.

3. Auditor pajak, adalah auditor yang bertugas melakukan audit terhadap para wajib pajak untuk menilai apakah wajib pajak tertentu telah memenuhi ketentuan peraturan perpajakan. Audit yang dilakukan adalah audit ketaatan.
4. Auditor internal, yaitu auditor yang bekerja di dalam suatu perusahaan untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan seperti halnya auditor pemerintah.

Untuk selanjutnya di dalam penelitian ini akan memfokuskan pada akuntan publik terdaftar atau auditor eksternal, yang dikenal dengan istilah auditor. Penggunaan istilah akuntan dalam pengertian akuntan publik terdaftar dilindungi oleh UU No.34 tahun 1954. Untuk dapat berpraktek sebagai akuntan publik, maka diperlukan izin dari Departemen Keuangan, dan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Persyaratan pendidikan, diperlukan gelar sarjana ekonomi jurusan akuntansi dari fakultas ekonomi negeri maupun swasta. Semua sarjana ekonomi jurusan akuntansi baik dari fakultas ekonomi negeri maupun swasta diharuskan mengikuti Pendidikan Profesi Akuntan (PPA) untuk mendapat gelar akuntan.
2. Persyaratan pengalaman, untuk memperoleh izin sebagai akuntan publik terdaftar harus memiliki pengalaman kerja sebagai auditor pada kantor akuntan publik atau BPKP paling sedikit 3 tahun.

2.1.5.2 Proses Audit

Audit terhadap laporan keuangan biasanya berawal dan berakhir dengan laporan keuangan (meliputi neraca, laporan rugi-laba, laporan arus kas, laporan perubahan modal, catatan pada rekening dan laporan direktur) suatu organisasi atau perusahaan yang diaudit. Hasil akhir dari sebuah audit adalah opini atau pendapat atas laporan keuangan yang telah disajikan oleh pihak manajemen kepada auditor. Tanggung jawab manajemen adalah menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan, sedangkan auditor bertanggung jawab atas opini atau pendapat yang diungkapkan terhadap laporan keuangan.

Pembagian tanggung jawab tersebut harus diperhatikan dengan seksama (Arens & Loebbecke, 2000). Menurut O'Reilly (1999) dalam Winarna dan Suparno (2003), auditor harus mengembangkan suatu tujuan audit yang spesifik (khusus) yang berhubungan dengan asersi manajemen. Kemudian mendesain dan melakukan tes audit untuk mendapatkan dan menguji bukti-bukti apakah tujuan telah tercapai agar bisa membentuk opini terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tanpa adanya bukti-bukti, maka laporan audit akan mempunyai tingkat validitas yang rendah (Woodrow, 1997 dalam Hendro, 2002). Keseluruhan hal yang dilakukan oleh auditor tersebut itulah yang disebut proses audit.

Dalam melakukan audit, auditor harus melalui 4 tahap (Arens & Loebbecke, 2000), yaitu :

1. Tahap I : Merencanakan dan merancang pendekatan audit

Di dalam setiap audit, ada bermacam-macam cara yang dapat ditempuh seorang auditor dalam mengumpulkan bahan bukti untuk tujuan

audit. secara keseluruhan. Dalam memilih dan merencanakan pendekatan audit yang akan dipilih, auditor harus mempertimbangkan dua hal berikut :

- a. Bukti kompeten yang cukup harus dikumpulkan untuk memenuhi
- b. tanggung jawab profesional dari auditor.
- c. Biaya pengumpulan bahan bukti harus dibuat seminimal dan seefisien mungkin.

Dari dua pertimbangan yang bertolak belakang tersebut, auditor harus mementingkan pada pertimbangan yang pertama dengan tidak mengabaikan pertimbangan yang ke dua. Auditor harus merancang suatu audit yang dapat menyeimbangkan kedua hal tersebut. Perencanaan dan perancangan pendekatan audit dapat dilakukan dengan :

- a. Mendapatkan pengetahuan atas bidang usaha klien, agar auditor dapat menginterpretasikan dengan benar maksud dari informasi yang diperoleh dari suatu audit maka dibutuhkan pemahaman yang jelas atas usaha dan industri klien.
- b. Memahami struktur pengendalian intern klien yang menetapkan resiko pengendalian. Agar auditor dapat merencanakan pengumpulan bahan bukti audit yang mencukupi, standar audit yang berlaku umum mensyaratkan auditor untuk memahami struktur pengendalian umum. Setelah auditor memahami struktur pengendalian intern klien, maka ia mampu mengevaluasi seberapa efektif pengendalian tersebut dapat mencegah dan menemukan kekeliruan dan kecurangan.

2. Tahap II : Melakukan pengujian pengendalian dan transaksi

Sebagian besar pengujian atas pengendalian mencakup pemeriksaan dokumen-dokumen yang mendukung transaksi. Pengujian atas pengendalian dilakukan untuk mendapatkan bahan bukti yang mendukung kebijakan dan prosedur pengendalian spesifik yang berperan terhadap tingkat risiko yang ditetapkan. Pengujian substantif atas transaksi dilakukan untuk memperoleh bahan bukti yang mendukung kebenaran moneter transaksi.

3. Tahap III : Melaksanakan prosedur analitis dan pengujian terinci atas saldo.

Di dalam tahapan ini, ada dua kategori umum prosedur yaitu:

- a. Prosedur analitis, yaitu prosedur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan menyeluruh transaksi dan saldo.
- b. Pengujian terinci atas saldo, merupakan prosedur khusus yang diarahkan untuk menguji kekeliruan moneter dalam laporan keuangan.

4. Tahap IV : Menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit.

Apabila tahapan-tahapan sebelumnya telah dilakukan dengan baik, maka auditor harus menggabungkan semua informasi yang didapatkan untuk memperoleh suatu kesimpulan yang menyeluruh mengenai kewajaran penyajian dan pelaporan suatu laporan keuangan. Tahap ini merupakan suatu proses yang sangat subjektif dan sangat tergantung pada pertimbangan profesional dari auditor. Tahapan ini terdiri dari langkahlangkah sebagai berikut :

a. Menelaah kewajiban bersyarat

Kewajiban bersyarat adalah kewajiban potensial yang harus diungkapkan dalam catatan kaki atas laporan keuangan. Auditor harus yakin pengungkapan kewajiban bersyarat telah memadai.

b. Menelaah Peristiwa kemudian (*subsequent event*)

Kejadian-kejadian yang terjadi setelah tanggal neraca tetapi sebelum tanggal penerbitan laporan keuangan dan laporan audit, biasanya akan mempunyai pengaruh terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, sehingga auditor perlu untuk lebih mencermati peristiwa-peristiwa tersebut.

c. Mengumpulkan bahan bukti akhir

Bahan bukti ini mencakup pelaksanaan prosedur analitis akhir, evaluasi asumsi kelangsungan hidup, mendapatkan surat pernyataan klien, dan membaca informasi dalam laporan keuangan tahunan untuk menjamin konsistensi dalam laporan keuangan.

d. Menerbitkan laporan audit.

Jika audit telah diselesaikan, Kantor Akuntan Publik harus mengeluarkan laporan audit yang menyertai laporan keuangan klien yang diterbitkan.

e. Komunikasi dengan komite audit dan manajemen

Auditor diminta untuk mengkomunikasikan masalah-masalah yang berkaitan dengan struktur pengendalian intern kepada komite audit atau kepada auditor senior.

2.1.6 Peran Auditor

Kamus Umum Bahasa Indonesia karya Badudu dan Zein (1994) mendefinisikan peran sebagai fungsi, tugas, atau pengambilan bagian dalam suatu kegiatan. Berdasarkan definisi tersebut, peran auditor berarti tugas-tugas atau jasa-jasa yang diberikan auditor dalam bidang-bidang yang diterjuninya.

Globalisasi mengakibatkan perubahan lingkungan bisnis dan tatanan sosial ekonomi masyarakat. Saat ini, peran auditor semakin kompleks dan meliputi berbagai bidang seperti bidang audit, pajak, serta *consulting*. Kebutuhan laporan keuangan tidak lagi hanya disediakan untuk manajemen dan bankir, namun telah meluas ke pihak lain seperti pemerintah, investor, kreditor, dan pemegang saham.

Oleh karena itu perusahaan harus membuat laporan keuangan yang transparan, akurat, tepat waktu, dan tidak menyimpang dari Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) sehingga informasi-informasi yang dimuat dalam laporan keuangan tersebut dapat dipergunakan oleh berbagai pihak untuk berbagai tujuan. Oleh karena itulah pada tahun 1998, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.24 / tahun 1998 yang mewajibkan semua perusahaan untuk menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. Sedangkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat peran yang dilakukan oleh auditor menurut Prihanto (2000) meliputi:

1. *Business assurance* (audit dan review)
2. *Consulting*

3. *Financial Advisory Service (Financial Forecast and Projections, Merger and Acquisition)*
4. *Human Resource Advisory (Other Employee Benefit, Recruitment)*
5. *Others (International Service, Litigation Service)*

Melihat perkembangan tersebut, peran akuntan publik menjadi semakin luas. Auditor harus mampu berperan menjadi mediator bagi perbedaan-perbedaan kepentingan antar pelaku bisnis dan masyarakat. Agar mampu menjalankan peran tersebut, auditor harus selalu menjaga mutu jasa yang diberikannya dan menjaga independensi, integritas, dan objektivitas profesinya. Baneu & Turley (1993) menyatakan dalam penelitiannya bahwa auditor harus bisa menjamin bahwa laporan keuangan yang diauditnya tidak menyimpang dari GAAP, menjamin bahwa prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkannya konsisten dengan periode sebelumnya, dan melaporkan jika kelangsungan hidup perusahaan diragukan. Bersamaan dengan perkembangan perekonomian dunia, peran auditor pun semakin luas, dan fungsi yang diberikan auditor juga semakin bervariasi.

Fungsi lain yang sangat dibutuhkan perusahaan adalah *Management Advisory Service (MAS)*. Auditor memberikan saran dan pendapatnya mengenai pemilihan dan penerapan prinsip-prinsip akuntansi. Di sini auditor diharapkan mampu berperan sebagai konsultan tanpa mengurangi independensi dan objektivitas auditor. Di samping itu auditor juga bisa meningkatkan pelayanannya di bidang pajak, pasar modal, dana pensiun, atau asuransi (Soedjais, 1999).

Porter (1993) kemudian melakukan penelitian empiris mengenai *expectation gap*. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi berbagai peran auditor yang diharapkan oleh publik atau pengguna laporan keuangan. Dengan mengetahui termasuk mana komponen-komponen tugas-tugas tersebut, maka tindakan korektif atas kegagalan auditor dapat segera dilakukan. Hal ini ternyata membawa dampak positif bagi perkembangan profesi auditor karena mampu mempersempit *expectation gap* antara publik dengan profesi auditor. Berikut adalah beberapa peran penting auditor dipandang dari sudut pandang publik dari penelitian Porter (1993) sebagai berikut :

1. Mendeteksi adanya pencurian aset-aset perusahaan
2. Mendeteksi adanya penyalahgunaan aset-aset perusahaan
3. Mendeteksi penyimpangan prosedur akuntansi laporan keuangan
4. Mendeteksi kekeliruan dalam laporan keuangan
5. Mendeteksi tindakan-tindakan ilegal yang dilakukan karyawan
6. Melakukan pemeriksaan terhadap informasi non-finansial
7. Melakukan pemeriksaan terhadap pengendalian intern perusahaan
8. Melakukan pemeriksaan terhadap efektivitas manajemen perusahaan
9. Melakukan pemeriksaan terhadap efisiensi manajemen perusahaan
10. Mengevaluasi dampak operasi perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya

Peran-peran penting tersebut sangat membutuhkan sikap profesional yang tinggi. Auditor tidak hanya menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, namun juga harus memperhatikan masalah moral dan etika serta memberikan pelayanan yang berkualitas bagi kliennya.

2.1.7 Kompetensi dan Independensi Auditor

Kualitas dari suatu audit itu ditentukan oleh dua hal yang tidak terpisahkan, yaitu *kompetensi dan independensi*.

2.1.7.1 Kompetensi

Kompetensi berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman yang memadai yang dimiliki akuntan publik dalam bidang auditing dan akuntansi. Dalam melaksanakan audit, akuntan publik harus bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan auditing. Pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan formal, yang selanjutnya diperluas melalui pengalaman dalam praktek audit. Selain itu, akuntan publik harus menjalani pelatihan teknis yang cukup yang mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum. Asisten junior untuk mencapai kompetensinya harus memperoleh pengalaman profesionalnya dengan mendapatkan supervisi memadai dan review atas pekerjaan dari atasannya yang lebih berpengalaman. Akuntan publik juga harus secara terus-menerus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam bisnis dan profesinya. Akuntan publik harus mempelajari, memahami dan menerapkan ketentuan-ketentuan baru dalam prinsip akuntansi dan standar auditing yang ditetapkan oleh organisasi profesi.

Kompetensi itu tidak terlepas dari suatu keahlian. Pengertian keahlian menurut Bedard (1989) adalah seseorang memiliki pengetahuan dan keterampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit. Dalam definisi yang berbeda, Dreyfus & Dreyfus (1986) dalam Christiawan (2002) menyatakan bahwa keahlian seseorang merupakan suatu gerakan yang

terus-menerus yang berupa proses pembelajaran dari mengetahui sesuatu menjadi mengetahui bagaimana. Berdasarkan pada definisi-definisi yang telah diuraikan dengan para ahli, peneliti mengambil kesimpulan dengan berlandaskan pada penelitian yang dilakukan oleh Bedard (1989), dan diteliti kembali oleh Murtanto (1998) yang memberikan sebuah wacana baru, bahwasanya kompetensi di dalam audit tidak semata-mata diperoleh dari ilmu pengetahuan dan pengalaman saja melainkan dari atribut penting yang lain yang menunjang keahlian audit.

Dari hasil penelitian tersebut diambil kesimpulan bahwa terdapat lima kategori yang mempengaruhi suatu kompetensi, yaitu : komponen pengetahuan, ciri-ciri psikologis, kemampuan berfikir, strategi penentuan keputusan, dan analisis tugas sebagai komponen yang mewakili keahlian audit.

2.1.7.2 Independensi

American Institute of Certified publik Accountant (AICPA) dalam Mayangsari (2003) menyatakan bahwa independensi adalah suatu kemampuan untuk bertindak berdasarkan integritas dan objektivitas. Integritas berhubungan dengan kejujuran intelektual seorang akuntan yang berupa prinsip moral yang jujur, tegas, memandang dan mengungkapkan fakta seperti apa adanya. Sedangkan yang dimaksud dengan objektivitas adalah sikap mental yang tidak memihak, baik kepada kepentingan pribadi ataupun orang lain, dalam melakukan tugas pemeriksaan.

Arens & Loebbecke (2000) memberikan pengertian tentang independensi dalam auditing, yakni sikap yang berpegang pada pandangan yang tidak

memihak dalam penyelenggaraan tes audit, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan pemeriksaan. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menyatakan bahwa independensi yang dimiliki oleh seorang akuntan publik berbeda dengan sikap yang dimiliki oleh seorang penuntut dalam perkara pengadilan yang cenderung memihak pada kepentingan korban. Sikap tidak memihak yang dimiliki oleh akuntan publik lebih dapat disamakan dengan sikap tidak memihaknya seorang hakim yang tidak memihak siapapun.

Dalam pekerjaannya, akuntan publik mengakui kewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang menyerahkan kepercayaan atas laporan keuangan yang independen. Independensi sendiri dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu independensi dalam kenyataan (*independent in fact*) dan independensi dalam penampilan (*independent in appearance*). Independensi dalam kenyataan berkaitan dengan objektivitas akuntan publik untuk bersikap bebas dari pengaruh kepentingan pribadi. Sedangkan independensi dalam penampilan merupakan persepsi pihak ke tiga bahwa seorang akuntan publik menjalankan proses audit dengan tidak berpihak pada salah satu kepentingan pihak manapun.

Sulit untuk menilai independensi dalam kenyataan yang dimiliki oleh seorang akuntan publik karena sikap mental yang dimilikinya bukan merupakan subjek untuk diukur, dan oleh karenanya hanya terbatas pada pertimbangan akuntan itu sendiri. Sedangkan independensi dalam penampilan akuntan publik hanya dapat ditentukan oleh persepsi masyarakat, khususnya pemakai laporan keuangan, terhadap sikap tidak memihak akuntan publik. Ada hubungan erat

antara kedua aspek independensi di atas, yaitu meskipun akuntan publik telah bersikap objektif dalam melaksanakan pemeriksaan akuntansi atau dengan kata lain akuntan publik dalam keadaan independen dalam kenyataan, namun apabila pemakai laporan keuangan meragukan akan independensi dalam kenyataan tersebut maka dapat dikatakan bahwa akuntan tersebut tidak independen. Oleh karena itu tidak cukup hanya dengan independensi dalam kenyataan saja akuntan publik itu dapat dikatakan independen, tetapi juga harus diikuti dengan independensi dalam penampilan.

2.1.8 Larangan KAP

Di dalam pelaksanaan profesi akuntan publik, di Indonesia telah memiliki standar etika profesi akuntan, terutama di dalam hubungannya sebagai auditor yang ditetapkan oleh IAI. Selain menetapkan standar etika profesi auditing, pada umumnya ada empat bidang utama dimana IAI berwenang menetapkan standar dan membuat aturan, yaitu:

1. Standar Auditing

Standar ini disusun oleh komite Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang bertugas menyusun semua standar auditing. Di Amerika Serikat pernyataan standar Auditing ini disebut sebagai *Statement on Auditing Standards* (SAS).

2. Standar Kompilasi dan penelahaan laporan keuangan

Komite SPAP-IAI dan *Compilation and Review Standard* bertanggungjawab mengenai pertanggungjawaban akuntan publik sehubungan dengan laporan keuangan suatu perusahaan yang tidak diaudit.

3. Standar Atestasi lainnya

IAI mengeluarkan beberapa pernyataan standar atestasi yang memiliki fungsi ganda, yaitu:

- a. Sebagai kerangka yang harus diikuti oleh badan penetapan standar yang ada di dalam IAI untuk mengembangkan standar terinci mengenai jenis jasa atestasi yang spesifik.
- b. Sebagai kerangka pedoman bagi praktisi bila tidak terdapat atau belum terdapat standar spesifik seperti itu.

4. Kode etik Profesi

Komite Kode Etik IAI, seperti halnya dengan *Committe on Proffessionel Ethics* di Amerika Serikat, bertanggungjawab untuk menetapkan ketentuan perilaku yang harus dipenuhi seorang akuntan publik

Walaupun demikian, di dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai auditor, akuntan publik juga harus mematuhi standar yang dikeluarkan oleh *International Federation of Accountant*, dan badan-badan regulator yang lain seperti Bappepam, serta undang-undang yang berlaku. Substansi kode etik Indonesia menurut Yani (2002), mencakup berbagai aturan yang berkaitan dengan perilaku yang diharapkan dari para akuntan. Secara garis besar aturan tersebut meliputi hal-hal yang berkaitan dengan : Kepribadian, Kecakapan

profesional, Tanggung jawab, Ketentuan Khusus. Sedangkan mengenai Pernyataan Etika Profesi, yang sudah disusun adalah :

1. Integritas, obyektivitas dan independensi
2. Kecakapan profesional
3. Pengungkapan informasi rahasia klien
4. Iklan bagi Kantor Akuntan Publik
5. Perpindahan staf atau partner dari satu kantor akuntan ke kantor akuntan lain.

Di dalam pelaksanaan kode etik profesi di suatu Kantor Akuntan Publik, terdapat 4 organisasi yang mengawasi pelaksanaan tersebut. Dua di antaranya adalah instansi pemerintah, yaitu: Direktorat Pembinaan dan Jasa Penilai pada Direktorat Jenderal Lembaga-lembaga Keuangan Departemen Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sedangkan yang dua lainnya Dewan Pertimbangan Profesi IAI dan Badan Pengawas Profesi di Kompartemen IAI, keduanya bernaung dibawah IAI. Oleh karena itu, merupakan hal yang sangat penting bagi tenaga ahli yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memiliki independensi dan kompetensi yang tinggi. Karena dengan independensi yang tinggi, para akuntan harus dapat menarik kesimpulan yang tidak memihak mengenai laporan keuangan. Sedangkan dengan kompetensi yang tinggi, para akuntan dapat melaksanakan audit dengan efektif dan efisien. Dalam meningkatkan indipendensi dan kompetensi dari profesi akuntan maka IAI menerbitkan sembilan elemen

pengendalian mutu, yang harus diterapkan di dalam sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP). Kesembilan elemen pengendalian mutu tersebut antara lain:

1. Independensi.

Semua anggota yang harus memenuhi persyaratan independen, misalnya apakah ada anggota yang memiliki saham di perusahaan klien.

2. Penugasan auditor.

Semua anggota harus memiliki tingkat kemampuan dan pelatihan teknik yang memadai.

3. Konsultasi.

Pada saat staff atau partner mengalami problem teknis, harus ada prosedur untuk mendapatkan petunjuk dari orang yang ahli.

4. Supervisi.

Kebijakan untuk menjamin supervisi pekerjaan yang memadai untuk seluruh tingkatan harus dilakukan untuk setiap penugasan.

5. Pengangkatan auditor.

Seluruh staff dan karyawan baru harus mampu melaksanakan tugasnya secara kompeten.

6. Pengembangan profesional.

Setiap karyawan harus memperoleh pengembangan profesional; yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan kerja secara kompeten.

7. Promosi.

Kebijakan promosi harus jelas, untuk menjamin promosi karyawan berlangsung sesuai antara kualifikasi dan tanggung jawabnya.

8. Penerimaan dan pemeliharaan hubungan dengan klien. Seluruh klien dan calon klien harus dievaluasi terlebih dahulu untuk meminimalisasi kemungkinan keterbatasan integritas manajemen.

9. Inspeksi.

Kebijakan dan prosedur harus jelas guna menunjang terpenuhinya kedelapan elemen pengendalian mutu secara konsisten.

Pedoman IAI di dalam menetapkan kesembilan pedoman pengendalian mutu tersebut adalah agar dapat menjadi pertimbangan Kantor Akuntan Publik (KAP) di dalam mengembangkan kebijaksanaan dan prosedur masing-masing.

Larangan KAP diantaranya adalah :

1. Memberikan jasa kepada klien apabila KAP tidak independen.
2. Memberikan jasa audit umum untuk klien yang sama berturut-turut selama 5 tahun.
3. Memberikan jasa yang tidak berkaitan dengan akuntansi, keuangan dan manajemen.
4. Mempekerjakan/menggunakan jasa pihak terasosiasi yang menolak memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan terhadap Akuntan Publik dan KAP. (Yani, 2002)

2.1.9 Komunikasi Hasil Audit

Komunikasi adalah bagian integral dalam audit. Mulai dari perencanaan penugasan, pelaksanaan pengujian, hingga pemantauan tindak lanjut sehingga pelaksanaan audit akan berjalan secara efektif dan efisien, efektif dalam arti

audit dapat mencapai hasil-hasil yang diinginkan; efisien karena proses audit dapat dilaksanakan dengan lancar sehingga sumber daya audit benar-benar digunakan untuk mencapai tujuan audit. (Pusdiklatwas BPKP, 2007)

Laporan hasil audit merupakan bentuk komunikasi tertulis yang berisi pesan agar pembaca laporan (auditee/manajemen) dapat mengerti dan menindaklanjuti temuan (sesuai rekomendasi yang terdapat di dalam laporan tersebut). Laporan audit seharusnya merupakan alat komunikasi yang efektif dan mempunyai dampak psikologis (positif maupun negatif) bagi auditor maupun auditee, terutama individu yang terlibat. Jika suatu rekomendasi tidak ditindaklanjuti oleh auditee atau pihak lain yang terkait, maka hal tersebut berarti komunikasi tertulis yang dilakukan oleh auditor tidak efektif. Karakteristik yang harus dipenuhi oleh suatu laporan hasil audit yang baik ialah:

1. Arti Penting

Hal – hal yang dikemukakan dalam laporan hasil audit harus merupakan hal yang menurut pertimbangan auditor cukup penting untuk dilaporkan. Hal ini perlu ditekankan agar ada jaminan bahwa penerima laporan yang waktunya sangat terbatas akan menyempatkan diri untuk membaca laporan tersebut.

2. Tepat-waktu dan kegunaan laporan

Kegunaan laporan merupakan hal yang sangat penting. Untuk itu, laporan harus tepat waktu dan disusun sesuai dengan minat serta kebutuhan penerimaan laporan, terlepas dari maksud apakah laporan ditujukan untuk memberikan informasi atau guna merangsang dilakukannya tindakan konstruktif.

3. Ketepatan dan kecukupan bukti pendukung

Ketepatan laporan diperlukan untuk menjaga kewajaran dan sikap tidak memihak sehingga memberikan jaminan bahwa laporan dapat diandalkan kebenarannya. Laporan harus bebas dari kekeliruan fakta maupun penalaran. Semua fakta yang disajikan dalam laporan harus didukung dengan bukti–bukti objektif dan cukup, guna membuktikan ketepatan dan kelayakan hal–hal yang dilaporkan.

4. Sifat menakutkan

Temuan, kesimpulan dan rekomendasi harus disajikan secara menakutkan dan dijabarkan secara logis dari fakta–fakta yang ditemukan. Informasi yang disertakan dalam laporan harus mencukupi agar menakutkan pihak penerima laporan tentang pentingnya temuan – temuan, kelayakan kesimpulan serta perlunya menerima rekomendasi yang diusulkan.

5. Objektif

Laporan hasil audit harus menyajikan temuan–temuan secara objektif tanpa prasangka, sehingga memberikan gambaran (perspektif) yang tepat.

6. Jelas dan sederhana

Agar dapat melaksanakan fungsi komunikasi secara efektif, pelaporan harus disajikan sejelas dan sesederhana mungkin. Ungkapan dan gaya bahasa yang berlebihan harus dihindari. Apabila terpaksa menggunakan istilah–istilah teknis atau singkatan–singkatan yang tidak begitu lazim, harus didefinisikan secara jelas.

7. Ringkas

Laporan hasil audit tidak boleh lebih panjang dari pada yang diperlukan, tidak boleh terlalu banyak dibebani rincian (kata-kata, kalimat, pasal atau bagian-bagian) yang tidak secara jelas berhubungan dengan pesan yang ingin disampaikan, karena hal ini dapat mengalihkan perhatian pembaca, menutupi pesan yang sesungguhnya, membingungkan atau melenyapkan minat pembaca laporan.

8. Lengkap

Walaupun laporan sedapat mungkin harus ringkas namun kelengkapannya harus tetap dijaga, karena keringkasan yang tidak informative bukan suatu hal yang baik. Laporan harus mengandung informasi yang cukup guna mendukung diperolehnya pengertian yang tepat mengenai hal-hal yang dilaporkan. Untuk itu perlu diserahkan informasi mengenai latar belakang dai pokok-pokok persoalan yang dikemukakan dan memberikan tanggapan positif terhadap pandangan-pandangan pihak objek audit atau pihak lain yang terkait. Dalam bahasa yang lain, dapat dinyatakan bahwa laporan hasil audit seyogyanya mempunyai karakteristik: *accurate, clear and concise, complete, objective, constructive*, dan *prompt*.

9. Nada yang konstruktif

Sejalan dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan dari objek audit, maka laporan hasil audit harus disusun dengan nada konstruktif sehingga membangkitkan reaksi positif terhadap temuan dan rekomendasi yang diajukan.

Pedoman pelaporan agar sesuai dengan efektivitas komunikasi dan dampak psikologis dari suatu laporan hasil audit:

1. Bentuk laporan agar dibuat sedemikian rupa sehingga membangkitkan minat orang untuk melihat isinya.
2. Sajikan kesimpulan (*executive summary*) pada bagian awal laporan agar pembaca dapat segera mengetahui intisari laporan tersebut.
3. Kesimpulan agar disajikan sedemikian rupa sehingga pembaca ingin mengetahui lebih mendalam tentang uraian dan kesimpulan.
4. Temuan agar disajikan sedemikian rupa sehingga pembaca dapat mengetahui tentang kriteria yang digunakan, kondisi (temuan), sebab dan akibat temuan tersebut serta melaksanakan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang disajikan dalam laporan hasil audit

Sebelum berhubungan dengan pihak luar, auditor harus sudah memiliki mekanisme komunikasi intern yang memadai sehingga tim audit menjadi kompak dan memiliki persepsi serta tujuan yang sama (Pusdiklatwas BPKP, 2007) Komunikasi intern dalam satu tim umumnya dimulai saat surat tugas audit diterima tim. Komunikasi selama pelaksanaan audit bertujuan untuk mengetahui apakah tim audit: Melaksanakan program audit sebagaimana mestinya; Mengidentifikasi permasalahan yang dijumpai dalam audit; dan Mengatasi masalah yang dijumpai dalam audit. Sedangkan komunikasi intern tim yang dilakukan pada tahap penyiapan konsep laporan hasil audit bertujuan antara lain: Untuk mencapai kata sepakat mengenai seluruh temuan audit final; Untuk memperoleh tanggapan dan persetujuan final dari pengendali teknis bahwa

seluruh temuan audit itu obyektif dan rekomendasi yang diberikan layak dan dapat dilaksanakan; Untuk memastikan bahwa kertas kerja audit telah disusun secara memadai dan substansi kertas kerja auditnya cukup sebagai bahan untuk menyusun laporan hasil audit. Komunikasi antara auditor dengan auditan adalah hal yang tidak bisa diabaikan, karena keberhasilan pelaksanaan audit memerlukan dukungan dan kerjasama dari auditan. Pengumpulan informasi terhambat jika auditan bersikap tertutup dan tidak mau bekerja sama.

Komunikasi antara auditor dengan auditan juga perlu untuk mengurangi kesan keliru bahwa auditor adalah pihak yang “mencari-cari kesalahan semata” yang menjadi sumber terjadinya sikap tertutup, menghindar, atau menghambat dari auditan. Selain itu ada pula komunikasi dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan penugasan audit. Komunikasi dengan pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi auditor dengan Instansi Teknis.

Tujuan dilakukannya komunikasi auditor dengan instansi teknis yang terkait. Komunikasi dengan instansi teknis terkait pada umumnya dilakukan secara tertulis dan formal yang ditandai dengan dilakukannya komunikasi dalam bentuk surat menyurat secara resmi. Namun demikian, untuk hal-hal yang memerlukan penjelasan secara panjang lebar dapat juga dilakukan secara lisan melalui pertemuan antara tim audit dengan pejabat instansi teknis terkait yang hasilnya dituangkan dalam bentuk tertulis. Komunikasi dengan instansi teknis terkait sifatnya *ad hoc* (tidak terjadwal) tetapi dapat dilakukan

kapan saja sepanjang terdapat cukup alasan dilakukannya komunikasi tersebut.

2. Komunikasi auditor dengan pihak ketiga yang ada hubungan kerja dengan auditan. Komunikasi auditor dengan pihak ketiga yang memiliki hubungan kerja dengan pihak auditan dimaksudkan untuk melakukan konfirmasi tentang suatu data hasil audit guna memperoleh keyakinan tentang suatu masalah. Komunikasi tersebut pada umumnya dilakukan secara tertulis. Karena secara formal auditor tidak memiliki hubungan kerja dengan pihak ketiga tersebut, maka komunikasi ini dilakukan dengan sepengetahuan auditan, bahkan secara formal yang meminta informasi itu adalah auditan. Tetapi jawaban pihak ketiga tersebut hendaknya dapat langsung diterima oleh auditor tanpa melalui auditan.
3. Komunikasi auditor dengan nara sumber/Pakar. Tujuan komunikasi auditor dengan nara sumber/pakar pada prinsipnya tidak berbeda dengan tujuan komunikasi dengan instansi teknis terkait, yaitu dalam rangka memperoleh informasi yang kompeten dan konfirmasi tentang suatu permasalahan yang diduga akan menimbulkan kontroversi dengan pihak auditan. Komunikasi dengan nara sumber atau pakar perorangan pada umumnya dilakukan secara tertulis dan dilakukan secara formal, yaitu dengan melakukan komunikasi dalam bentuk surat menyurat secara resmi. Namun demikian, untuk hal-hal yang membutuhkan penjelasan secara panjang lebar dan luas, dapat pula dilakukan secara lisan, yaitu melalui suatu seminar dengan meminta nara

sumber sebagai pembicara tentang masalah yang diinginkan. Hasil seminar tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis.

4. Komunikasi auditor dengan instansi penyidik (Kejaksaan/ Kepolisian). Komunikasi dengan pihak instansi penyidik dimaksudkan untuk meningkatkan keberhasilan penanganan penyelamatan keuangan/ kekayaan negara/daerah serta guna meningkatkan daya cegah atas kemungkinan timbulnya perbuatan yang dapat merugikan keuangan atau kekayaan negara/daerah di kemudian hari. Komunikasi dengan pihak instansi penyidik dapat dilakukan baik secara lisan maupun secara tertulis dan bersifat formal. Komunikasi secara lisan. Selain itu, komunikasi dengan pihak instansi penyidik dapat dilakukan pada saat adanya permintaan bantuan penyelidikan suatu kasus, misalnya berupa menghitung jumlah kerugian negara/daerah. Komunikasi dalam rangka pemaparan indikasi awal dilakukan segera setelah diperoleh informasi yang berindikasi adanya tindak pidana yang menurut pertimbangan tim audit memerlukan pandangan atau pendapat dari pihak instansi penyidik guna menguatkan tim audit tentang terpenuhinya unsur tindak pidana dalam kasus yang bersangkutan.

2.2 Review Penelitian Terdahulu

Di Indonesia keberadaan *expectation gap* telah diteliti oleh beberapa peneliti. Ermawan (2001) melakukan penelitian berjudul Analisis Persepsi Pemakai Informasi Akuntansi, Akuntansi Bukan Publik, Masyarakat Umum, dan Akuntan Publik terhadap Tugas Akuntan Publik. Hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa Pemakai informasi akuntansi, masyarakat umum, akuntan publik secara signifikan mempersepsikan tugas akuntan publik dilaksanakan secara layak/memuaskan, sedangkan akuntan bukan publik mempersepsikan tugas akuntan publik tidak dilaksanakan secara layak/memuaskan. Tidak ada *expectation gap* mengenai tugas akuntan publik antara pemakai informasi akuntansi, akuntansi bukan publik, masyarakat umum, dan akuntan publik.

Penelitian Suatmaja (2004) menunjukkan bahwa tidak ada *expectation gap* antara pemakai laporan keuangan, auditor, dan mahasiswa akuntansi terhadap *expectation gap* dalam isu peran auditor dan aturan serta larangan pada kantor akuntan publik. Hal ini ditunjukkan oleh hasil olah data dengan menggunakan uji ANOVA *oneway*. Sedangkan dalam penelitian Yulianti, dkk (2007) menunjukkan adanya *expectation gap* antara pemakai laporan keuangan pemerintah dan auditor pemerintah mengenai peran dan tanggung jawab auditor pemerintah. Auditor pemerintah mempunyai persepsi yang lebih tinggi terhadap peran dan tanggung jawabnya dibandingkan dengan pengguna laporan keuangan.

Nasser, dkk (2007) dalam penelitiannya yang berjudul *Expectation Gap* antara Mahasiswa, Auditor dan Manager terhadap Sikap dan Kinerja Auditor. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah:

1. Ada *expectation gap* antara mahasiswa, auditor, dan manager mengenai proses audit dan tanggung jawab auditor
2. Tidak ada *expectation gap* antara mahasiswa, auditor, dan manager mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor

3. Tidak ada *expectation gap* antara mahasiswa, auditor, dan manager mengenai sikap auditor terhadap laporan keuangan
4. Tidak ada *expectation gap* antara mahasiswa, auditor, dan manager mengenai sikap auditor terhadap klien

Indrarto (2009) dalam penelitiannya meneliti tentang masalah perbedaan persepsi pemakai laporan, auditor, akuntan pendidik, dan mahasiswa akuntansi terhadap *expectation gap* dalam isu auditor & proses audit, peran auditor, serta kompetensi dan independensi auditor, dengan metode analisis data ANOVA dan Kruskal Wallis menunjukkan adanya *expectation gap* antara pemakai laporan, auditor, akuntan pendidik, dan mahasiswa akuntansi dalam isu auditor & proses audit, peran auditor, serta kompetensi dan independensi auditor.

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

2.3.3 Persepsi antara Pemakai Laporan Keuangan dan Auditor terhadap *Expectation Gap* dalam Isu Auditor dan Proses Audit

Persepsi mengenai peran dan tanggung jawab auditor antara pemakai laporan keuangan dan auditor dapat berbeda, yang antara lain disebabkan oleh pendidikan dan pengalaman. Hal tersebut mengungkapkan adanya *expectation gap*, seperti yang dikemukakan oleh Guy & Sullivan (1988), bahwa *expectation gap* terjadi karena adanya perbedaan antara apa yang masyarakat dan pengguna laporan keuangan percaya sebagai tanggung jawab akuntan dan auditor dan apa yang akuntan dan auditor percayai sebagai tanggung jawabnya. Harapan

masyarakat atau pemakai laporan keuangan terhadap auditor tentang laporan keuangan secara nyata melebihi peran auditor dan opini auditnya.

Indrarto (2008) mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan *expectation gap* antara auditor dengan pemakai laporan keuangan mengenai isu auditor dan proses audit. Auditor memiliki persepsi yang lebih positif mengenai isu auditor dan proses audit, dibandingkan oleh pemakai laporan keuangan auditan pemerintah yang antara lain disebabkan faktor pendidikan dan pengalaman. Pendidikan yang dimiliki oleh auditor, baik pendidikan formal maupun informal, meningkatkan pengetahuan yang benar mengenai peran dan tanggung jawab auditor dalam melaksanakan auditing. Selain itu, pengalaman yang dimiliki oleh auditor juga meningkatkan ketrampilan auditing, sehingga auditor benar-benar mengerti peran dan tanggung jawabnya. Sedangkan pemakai laporan keuangan memiliki persepsi yang negatif mengenai peran dan tanggung jawab auditor karena pengetahuan yang dimiliki terbatas sehingga kurang mengerti secara benar mengenai auditing, yang ditunjukkan dengan menganggap bahwa akuntansi dan auditing merupakan hal yang sama.

Berdasarkan penjabaran di atas maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Terdapat perbedaan persepsi antara pemakai laporan keuangan dan auditor terhadap *expectation gap* dalam isu auditor dan proses audit

2.3.4 Persepsi antara Pemakai Laporan Keuangan dan Auditor terhadap *Expectation Gap* dalam Isu Peran Auditor

Indrarto (2008) mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan *expectation gap* antara pemakai laporan keuangan, auditor, akuntan pendidik, dan mahasiswa akuntansi mengenai peran auditor. Auditor memiliki persepsi yang lebih positif mengenai peran auditor, dibandingkan oleh pemakai laporan keuangan yang lain disebabkan faktor pendidikan dan pengalaman. Pendidikan yang dimiliki oleh auditor, baik pendidikan formal maupun informal, meningkatkan pengetahuan yang benar mengenai peran dan tanggung jawab auditor dalam melaksanakan auditing. Selain itu, pengalaman yang dimiliki oleh auditor juga meningkatkan ketrampilan auditing, sehingga auditor benar-benar mengerti peran dan tanggung jawabnya. Sedangkan pemakai laporan keuangan memiliki persepsi yang negatif mengenai peran dan tanggung jawab auditor karena pengetahuan yang dimiliki terbatas sehingga kurang mengerti secara benar mengenai auditing, yang ditunjukkan dengan menganggap bahwa akuntansi dan auditing merupakan hal yang sama.

Berdasarkan penjabaran di atas maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H2: Terdapat perbedaan persepsi antara pemakai laporan keuangan dan auditor terhadap *expectation gap* dalam isu peran auditor

2.3.5 Persepsi antara Pemakai Laporan Keuangan dan Auditor terhadap *Expectation Gap* dalam Isu Kompetensi & Independensi Auditor

Indrarto (2008) mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan *expectation gap* antara auditor dengan pemakai laporan keuangan mengenai isu kompetensi dan independensi. Auditor memiliki persepsi yang lebih positif mengenai isu kompetensi dan independensi, dibandingkan oleh pemakai laporan keuangan yang antara lain disebabkan faktor pendidikan dan pengalaman. Pendidikan yang dimiliki oleh auditor, baik pendidikan formal maupun informal, meningkatkan pengetahuan yang benar mengenai peran dan tanggung jawab auditor dalam melaksanakan auditing. Selain itu, pengalaman yang dimiliki oleh auditor juga meningkatkan ketrampilan auditing, sehingga auditor benar-benar mengerti peran dan tanggung jawabnya. Sedangkan pemakai laporan keuangan memiliki persepsi yang negatif mengenai peran dan tanggung jawab auditor karena pengetahuan yang dimiliki terbatas sehingga kurang mengerti secara benar mengenai auditing, yang ditunjukkan dengan menganggap bahwa akuntansi dan auditing merupakan hal yang sama.

Nugroho (2004) mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan *expectation gap* antara auditor dengan pemakai laporan keuangan mengenai isu kompetensi dan independensi. Rusliyawati dan Halim (2006) mengungkapkan adanya *expectation gap* antara pengguna laporan keuangan dengan auditor mengenai kompetensi, independensi.

Berdasarkan penjabaran di atas maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H3: Terdapat perbedaan persepsi antara pemakai laporan keuangan dan auditor terhadap *expectation gap* dalam isu kompetensi & independensi auditor

2.3.6 Persepsi antara Pemakai Laporan Keuangan dan Auditor terhadap *Expectation Gap* dalam Isu Larangan Pada KAP

Gramling & Wallace (1996) yang menunjukkan bahwa di Amerika juga terjadi *expectation gap*, dimana salah satu kasusnya adalah perbedaan harapan tentang peran auditor dan aturan serta larangan di dalam Kantor Akuntan Publik

Suatmaja (2004) mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan *expectation gap* antara pemakai laporan keuangan, auditor, akuntan pendidik, dan mahasiswa akuntansi mengenai larangan pada KAP. Auditor memiliki persepsi yang lebih positif mengenai aturan dan larangan pada KAP, dibandingkan oleh pemakai laporan keuangan yang lain disebabkan faktor pendidikan dan pengalaman. Pendidikan yang dimiliki oleh auditor, baik pendidikan formal maupun informal, serta pengalaman meningkatkan pengetahuan yang benar mengenai peran dan tanggung jawab auditor dalam melaksanakan aturan dan larangan pada KAP. Sedangkan pemakai laporan keuangan memiliki persepsi yang negatif mengenai larangan KAP karena pengetahuan yang dimiliki terbatas sehingga kurang mengerti secara benar mengenai aturan dan larangan KAP.

Berdasarkan penjabaran di atas maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H4: Terdapat perbedaan persepsi antara pemakai laporan keuangan dan auditor terhadap *expectation gap* dalam isu larangan pada KAP

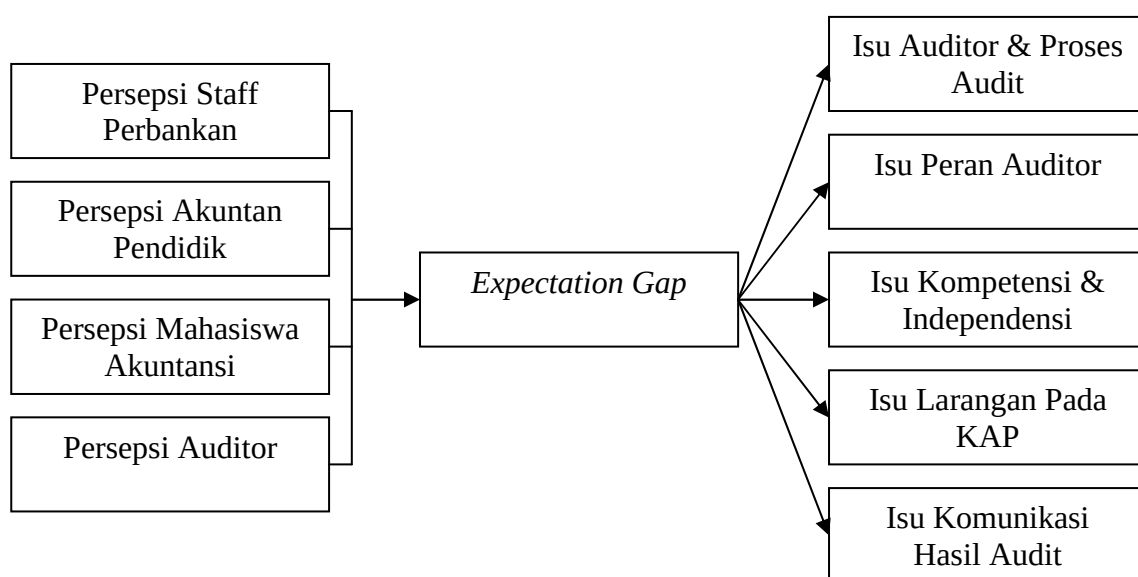
2.3.7 Persepsi antara Pemakai Laporan Keuangan dan Auditor terhadap *Expectation Gap* dalam Isu Komunikasi Hasil Audit

Pritasari (2004) mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan *expectation gap* antara pemakai laporan keuangan, auditor, akuntan pendidik, dan mahasiswa akuntansi mengenai komunikasi hasil audit. Auditor memiliki persepsi yang lebih positif mengenai komunikasi hasil audit, dibandingkan oleh pemakai laporan keuangan yang lain disebabkan faktor pendidikan dan pengalaman. Pendidikan yang dimiliki oleh auditor, baik pendidikan formal maupun informal, serta pengalaman meningkatkan pengetahuan yang benar mengenai tanggung jawabnya dalam mengkomunikasikan hasil audit. Sedangkan pemakai laporan keuangan memiliki persepsi yang negatif mengenai komunikasi hasil audit karena pengetahuan yang dimiliki terbatas sehingga kurang mengerti secara benar mengenai pengkomunikasian hasil audit.

Berdasarkan penjabaran di atas maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H5: Terdapat perbedaan persepsi antara pemakai laporan keuangan dan auditor terhadap *expectation gap* dalam isu komunikasi hasil audit

Berdasarkan berbagai teori yang telah dikemukakan dan pendalaman masalah yang ada, model penelitian mengenai persepsi Staff Perbankan, auditor, akuntan pendidik, dan mahasiswa akuntansi terhadap *expectation gap* dalam isu auditor dan proses audit, peran auditor, kompetensi dan independensi, larangan KAP dan komunikasi hasil audit maka dapat digambarkan suatu alur pemikiran yang tertuang dalam skema kerangka pemikiran berikut ini.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis

Dari bagan diatas dapat dilihat empat kelompok responden, yaitu pemakai laporan keuangan, auditor, akuntan pendidik, dan mahasiswa akuntansi masing-masing mempersepsikan *expectation gap* yang meliputi isu auditor dan proses audit, peran auditor, kompetensi dan independensi larangan KAP dan komunikasi hasil audit. Kemudian, persepsi keempat kelompok responden tersebut dibandingkan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi atau tidak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Desain Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian survei, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang dilakukan untuk mengetahui status suatu gejala, dan menentukan adanya kesamaan status gejala tersebut dengan membandingkannya dengan suatu standar yang telah dipilih, serta untuk membuktikan kebenaran dari suatu hipotesis (Singarimbun & Effendi, 2006).

Untuk membuktikan adanya *expectation gap*, dilakukan survei terhadap sampel, di mana hasil pengukuran sampel akan digeneralisasikan untuk populasi. Populasi yang menjadi unit analisis dibagi ke dalam kelompok. Hasil analisis dari masing-masing kelompok akan digunakan untuk mengetahui perbedaan persepsi antar kelompok yang dibandingkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *cross-sectional model*, dimana pengumpulan data dilakukan satu kali pada waktu yang telah ditentukan, sehingga data dapat diperoleh dengan cepat, sekaligus menggambarkan adanya perubahan atau perkembangan (sikap, pandangan, opini) individu pada saat dilakukannya penelitian, karena subjek diambil dari berbagai tingkat usia (Arikunto, 2002).

Selanjutnya, desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yaitu suatu penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data angka yang diolah dengan metode statistika tertentu (Azwar, 2008).

Dengan kata lain, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya bersifat angka.

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Azwar (2008) menjelaskan bahwa variabel adalah konsep mengenai atribut atau sifat yang terdapat pada subyek penelitian dan merupakan fokus dari kegiatan penelitian. Variabel adalah obyek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2002). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. *Expectation gap* mengenai isu auditor dan proses audit

Expectation gap mengenai isu auditor dan proses audit adalah perbedaan persepsi antara pemakai laporan keuangan, auditor, akuntan pendidik, dan mahasiswa akuntansi dengan auditor mengenai proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan auditor untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud, dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Indikator isu auditor dan proses audit (Gramling & Wallence, 1996) adalah:

- a. Kualitas dari audit perusahaan sudah meningkat dari tahun ke tahun (A1)
- b. Para investor mengharapkan terlalu banyak dari auditor (A2)
- c. Auditor terlalu memperhatikan pemenuhan keinginan manajemen perusahaan (A3)

- d. Proses audit sangat dilemahkan dengan adanya standar akuntansi yang tidak tepat (A4)
- e. Auditor bersedia untuk melakukan penyelesaian tuntutan atas kelalaiannya di luar pengadilan (A5)
- f. Audit hanya mempunyai sedikit manfaat untuk perusahaan (A6)
- g. Penyelesaian suatu penugasan audit membutuhkan waktu cukup lama (A7)
- h. Auditor tidak memahami masalah bisnis perusahaan yang diaudit (A8)
- i. Auditor harusnya melaporkan efisiensi manajemen perusahaan kepada pemegang saham (A9)
- j. Auditor seharusnya mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan efisiensi manajemen perusahaan (A10)
- k. Komite audit yang terdiri dari direktur non-eskutif seharusnya meningkatkan independensi auditor (A11)
- l. Kualitas kerja audit secara lengkap sudah diatur oleh profesi akuntan (A12)

2. *Expectation gap* mengenai peran auditor

Expectation gap mengenai peran auditor adalah perbedaan persepsi antara pemakai laporan keuangan, auditor, akuntan pendidik, dan mahasiswa akuntansi dengan auditor mengenai tugas-tugas atau jasa-jasa yang diberikan auditor dalam bidang-bidang yang diterjuninya. Indikator peran auditor (Gramling & Wallence, 1996) adalah:

- a. Sesuai dengan standar akuntansi keuangan (B1)

- b. Konsistensi dengan praktek akuntansi yang berlaku (B2)
- c. Tidak ada penyimpangan yang disengaja yang material (B3)
- d. Tidak ada kesalahan tak disengaja yang material (B4)
- e. Semua kecurangan yang material dapat dideteksi (B5)
- f. Sistem pengendalian internal perusahaan yang diaudit berjalan dengan memuaskan (B6)
- g. Kelangsungan hidup perusahaan masa yang akan datang tidak diragukan (B7)
- h. Perusahaan berjalan secara efisien (B8)
- i. Semua tindakan yang salah telah dikonfirmasi secara signifikan (cukup berarti) kepada lembaga yang berwenang (B9)

3. *Expectation gap* mengenai isu kompetensi dan independensi

Expectation gap mengenai isu kompetensi dan independensi adalah perbedaan persepsi antara pemakai laporan keuangan, auditor, akuntan pendidik, dan mahasiswa akuntansi dengan auditor mengenai keyakinan akan adanya pengetahuan dan ketrampilan khusus yang dimiliki oleh auditor yang mendukung tugas-tugas atau jasa-jasanya, serta suatu cara pandang yang tidak memihak didalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan audit. Indikator kompetensi dan independensi (Christiawan, 2002) adalah:

- a. Auditor mampu memberikan pendapat melalui bahasa lisan maupun tertulis (*verbal dan nonverbal skills*) (C1)

- b. Auditor mampu berinteraksi dengan beragam orang (*interpersonal skills*) (C2)
- c. Auditor mampu berpikir secara sistematis dan kronologis (*thinking skills*) (C3)
- d. Auditor mampu memimpin dan mengorganisasi orang lain (*ability on leading and organizing others*) (C4)
- e. Auditor mengetahui tanggung jawab profesional (C5)
- f. Auditor mengetahui Standar Profesional Akuntan Publik (C6)
- g. Auditor mengetahui praktek jasa attestasi (C7)
- h. Auditor mengetahui Standar Akuntansi Keuangan (C8)
- i. Auditor mengetahui analisis laporan keuangan (C9)
- j. Auditor mengetahui tanggung jawab moral (*emphaty*) (C10)
- k. Auditor mempunyai ketulusan hati (*integrity*) (C11)
- l. Auditor bersikap sesuai persistensi/kemauan diri (*persistency*) (C12)
- m. Auditor memiliki kecakapan dan keahlian teknik yang memadai dalam bidang akuntan (C13)
- n. Auditor memiliki kecakapan dan keahlian teknik yang memadai dalam bidang pemeriksaan (C14)
- o. Perusahaan menginginkan Auditor memberikan pendapat yang sesuai dengan keinginannya (C15)
- p. Manajemen Perusahaan ikut campur tangan dalam penyusunan program-program pemeriksaan (C16)

- q. Perusahaan secara signifikan membatasi ruang lingkup pemeriksaan Auditor yang berakibat tidak terdapatnya bukti yang cukup memadai (C17)
- r. Auditor dikatakan memiliki tanggung jawab yang merupakan konsekuensi dari tugas profesinya (C18)
- s. Auditor mempunyai tanggung jawab apabila mengetahui tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan tugas profesinya (C19)
- t. Auditor dikatakan memiliki tanggung jawab profesi apabila di dalam profesinya lebih mementingkan kepentingan umum dibanding kepentingan tertentu (C20)
- u. Salah satu pegawai atau staf pemeriksaan memiliki hubungan keluarga dekat dengan pengurus perusahaan yang diaudit (C22)
- v. Perusahaan kecil dan perusahaan besar yang sekaligus sebagai anggota akuntan public menunjuk kantor akuntan public tersebut untuk mengaudit laporan keuangan (C23)
- w. Auditor memiliki hubungan piutang pada pihak perusahaan yang diauditnya atau dengan karyawan penting perusahaan yang diaudit (C24)
- x. Auditor mengaudit laporan keuangan perusahaan lain (C25)
- y. *Fee* yang diterima auditor dari seorang klien merupakan bagian besar dari total pendapatan auditor (C26)
- z. Auditor menerima imbalan dari tugas profesinya selain dari *fee* yang sudah ditentukan dalam kontrak kerja (C27)

- aa. Auditor menetapkan *fee*-nya berdasarkan manfaat yang akan atau telah diterima oleh kliennya (C28)

4. *Expectation gap* mengenai larangan pada KAP

Expectation gap mengenai larangan KAP adalah perbedaan persepsi antara pemakai laporan keuangan, auditor, akuntan pendidik, dan mahasiswa akuntansi dengan auditor mengenai berbagai aturan yang berkaitan dengan perilaku yang diharapkan dari para akuntan. Secara garis besar aturan tersebut meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kepribadian, kecakapan profesional, tanggung jawab, ketentuan khusus. Indikator larangan KAP (Suatmaja, 2004) adalah:

- a. Sebuah Kantor Akuntan Publik seharusnya melarang anggotanya memiliki saham perusahaan yang diaudit (D1)
- b. Sebuah Kantor Akuntan Publik tidak memberikan jasa penasehat manajemen (*management advisory*) (D2)
- c. Sebuah Kantor Akuntan Publik seharusnya tujuan utamanya tidak untuk mendapatkan laba (D3)
- d. Sebuah Kantor Akuntan Publik seharusnya tidak menetapkan *fee* audit diatas 15% dari total pendapatan perusahaan yang diaudit (D4)
- e. Sebuah Kantor Akuntan Publik seharusnya mempunyai batas periode maksimum mengaudit seorang klien (D5)
- f. Sebuah Kantor Akuntan Publik seharusnya memiliki metode audit yang diawasi pelaksanaannya oleh komite standar komisi (D6)

- g. Sebuah Kantor Akuntan Publik seharusnya penunjukkan dan *fee* audit ditentukan oleh badan yang independen (terlepas) dari perusahaan klien (D7)
- h. Sebuah Kantor Akuntan Publik seharusnya memiliki kewajiban terbatas yang ditetapkan oleh undang-undang (D8)

5. *Expectation gap* mengenai komunikasi hasil audit

Expectation gap mengenai komunikasi hasil audit adalah perbedaan persepsi antara pemakai laporan keuangan, auditor, akuntan pendidik, dan mahasiswa akuntansi dengan auditor mengenai kesenjangan informasi (*information gap*) akibat proses komunikasi yang mengalami kesalahan antara kedua pihak atas pesan yang disampaikan melalui laporan audit. Indikator komunikasi hasil audit (Dennis, 1975) adalah:

- a. Komunikasi auditee ke auditor
 - 1) Auditee merasa bebas berbicara dengan auditor
 - 2) Auditor bersedia mendengar keluhan auditee
 - 3) Auditor menganjurkan agar auditee memberi tahu jika ada kesulitan
- b. Komunikasi auditor ke auditee
 - 1) Auditor menjelaskan maksud ucapannya dan mengartikan kata-kata yang diucapkannya ke auditee
 - 2) Auditor memberikan informasi yang auditee inginkan dan informasi yang ada perlukan
 - 3) Penjelasan yang diberikan oleh auditor jelas dan mudah dimengerti
- c. Persepsi auditee mengenai komunikasi dengan auditor

- 1) Auditee yakin bahwa bawahan auditor terbuka dan berterus terang kepada auditee
- 2) Auditee yakin bahwa auditor memahami persoalannya
- d. Keandalan informasi
 - 1) Informasi yang auditee terima dari auditor dapat dipercaya
6. Persepsi pemakai laporan keuangan dan auditor
 - a. Persepsi staff perbankan adalah sikap atau penilaian staff perbankan (account officer) terhadap isu auditor dan proses audit, peran auditor, kompetensi dan independensi auditor, larangan pada KAP, dan komunikasi hasil audit.
 - b. Persepsi auditor adalah sikap atau penilaian auditor terhadap isu auditor dan proses audit, peran auditor, kompetensi dan independensi auditor, larangan pada KAP, dan komunikasi hasil audit.
 - c. Persepsi akuntan pendidik adalah sikap atau penilaian dosen akuntansi terhadap isu auditor dan proses audit, peran auditor, kompetensi dan independensi auditor, larangan pada KAP, dan komunikasi hasil audit.
 - d. Persepsi mahasiswa adalah sikap atau penilaian mahasiswa/i akuntansi terhadap isu auditor dan proses audit, peran auditor, kompetensi dan independensi auditor, larangan pada KAP, dan komunikasi hasil audit.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah kelompok subyek yang hendak digeneralisasikan oleh hasil penelitian (Azwar, 2008). Sedangkan Arikunto (2002) menjelaskan bahwa

populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi di dalam penelitian ini pemakai laporan keuangan, auditor yang berpraktek sebagai akuntan publik, dosen akuntansi atau akuntan pendidik, serta mahasiswa akuntansi yang ada di wilayah Semarang.

Pemilihan dan pengumpulan sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan *convenience sampling* melalui beberapa kriteria, yaitu sebagai berikut :

1. Pemakai laporan keuangan merupakan staff perbankan di Semarang, yaitu *account officer*.
2. Akuntan pendidik yang merupakan dosen jurusan akuntansi baik perguruan tinggi negeri maupun swasta yang berdomisili di Semarang.
3. Mahasiswa akuntansi, merupakan mahasiswa jurusan akuntansi yang pernah mengambil mata kuliah auditing pada perguruan tinggi negeri maupun swasta di Semarang
4. Auditor merupakan Akuntan Publik yang telah berpraktik sebagai Akuntan Publik di KAP Semarang.

3.4 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer, yaitu data yang diperoleh melalui survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Data diperoleh dari jawaban responden terhadap pertanyaan serta tanggapan terhadap pernyataan yang diajukan oleh peneliti melalui kuesioner (Azwar, 2008).

Di dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan data sekunder, yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Azwar, 2008). Data tersebut berupa literatur-literatur yang relevan dengan tema dalam penelitian ini, sebagai dasar menyusun landasan teori dan bisa berasal dari artikel dalam jurnal, *text books*, dan dari sumber lainnya guna mendukung data primer agar hasil yang diharapkan dapat tercapai.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab dan merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden (Azwar, 2008). Kuesioner yang telah dibuat oleh peneliti disebarkan kepada responden langsung yaitu pemakai laporan keuangan dan auditor.

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengadopsi model Likert. Model Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan.

Kuesioner yang digunakan untuk mengungkap isu auditor dan proses audit, isu peran auditor, isu kompetensi dan independensi, isu larangan KAP, dan isu komunikasi hasil audit, menggunakan nilai 1 untuk jawaban sangat tidak setuju sampai nilai 5 untuk jawaban sangat setuju. Sedangkan untuk kuesioner kinerja auditor menggunakan nilai 1 untuk jawaban sangat tidak memuaskan sampai nilai 5 untuk jawaban sangat memuaskan.

Selanjutnya untuk memenuhi syarat yang baik dari suatu instrumen penelitian, maka peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas pada kuesioner kualitas layanan. Adapun penjelasan dari kedua hal tersebut sebagai berikut :

3.5.1 Validitas

Validitas berasal dari kata *validity* yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya (Azwar, 2007). Uji validitas kuesioner dengan menggunakan teknik korelasi *Product Moment* dari Pearson (Azwar, 2007), yaitu mengkorelasikan skor item dengan skor total. Perhitungan koefisien korelasi antara item dengan skor total akan mengakibatkan *over estimate* terhadap korelasi yang sebenarnya, maka perlu dilakukan koreksi dengan menggunakan *part-whole* (Azwar, 2007).

Selanjutnya untuk mengetahui apakah suatu item valid atau gugur maka dilakukan perbandingan antara koefisien r hitung dengan koefisien r tabel. Jika r hitung $>$ r tabel berarti item valid. Sebaliknya jika r hitung $<$ r tabel berarti item tidak valid (gugur).

3.5.2 Reliabilitas

Menurut Azwar (2007) reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda apabila dilakukan kembali kepada subyek yang sama. Pada penelitian ini digunakan teknik perhitungan reliabilitas koefisien *Alpha Cronbach*, dengan alasan komputasi dengan teknik ini akan memberikan harga yang lebih kecil atau sama besar dengan reliabilitas yang sebenarnya (Azwar, 2007). Jadi ada kemungkinan dengan menggunakan teknik ini akan lebih cermat karena dapat mendeteksi hasil yang sebenarnya.

Koefisien reliabilitas berkisar antara +1,00 sampai -1,00 dan untuk mengetahui koefisien reliabilitas yang memuaskan sangat tergantung dari fungsi dan tujuan pengukuran. Nilai batas yang digunakan untuk menilai tingkat reliabilitas yang dapat diterima adalah 0,70 (Ferdinand, 2006). Meski demikian, Nunnally dan Bernstein (Ferdinand, 2006) menjelaskan bahwa untuk penelitian eksplorasi, reliabilitas yang sedang antara 0,50 – 0,60 sudah cukup untuk menjustifikasi sebuah penelitian. Mengacu pada pendapat beberapa tokoh di atas peneliti menetapkan bahwa kuesioner dalam penelitian ini dianggap reliabel jika memiliki koefisien *alpha* lebih dari 0,60.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data adalah cara yang digunakan dalam mengolah data yang diperoleh sehingga didapatkan suatu hasil analisis atau hasil uji (Azwar, 2008). Data-data yang diperoleh dari penelitian tidak dapat digunakan secara langsung,

tetapi perlu diolah lebih dulu agar data tersebut dapat memberikan keterangan yang dapat dipahami, jelas, dan teliti.

3.6.1 Analisis Indeks Jawaban Responden

Analisis indeks jawaban responden merupakan salah satu bentuk analisis statistik deskriptif. Teknik tersebut digunakan untuk memberikan penjelasan gambaran umum demografi responden penelitian dan persepsi responden mengenai masing-masing variabel penelitian (Arikunto, 2002):

Alternatif jawaban yang digunakan dalam penelitian ini ada lima, sehingga nilai minimum adalah 1 dan nilai maksimum adalah 5. Oleh karena itu, rumus yang digunakan dalam teknik analisis indeks sebagai berikut (Ferdinand, 2006):

$$\text{Nilai Indeks: } \frac{\{(\%F_{1 \times 1}) + (\%F_{2 \times 2}) + (\%F_{3 \times 3}) + (\%F_{4 \times 4}) + (\%F_{5 \times 5})\}}{5}$$

Keterangan:

F1, F2, ..., F5: Frekuensi responden yang menjawab nilai 1,2, ...,5

Dengan menggunakan kriteria tiga kota (*three box method*), maka akan digunakan sebagai dasar interpretasi nilai indeks sebagai berikut:

10,00 – 40,00	: rendah
40,01 – 70,00	: sedang
70,01 – 100,00	: tinggi

3.6.2 Analisis Variansi (Anova) One Ways

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik anova *one way* (Azwar, 2008). Syarat untuk menggunakan anova *one way* adalah :

1. Bertujuan untuk mengetahui perbedaan lebih dari tiga kelompok.
2. Variabel dependen memiliki data berjenis interval atau rasio, sedangkan variabel independen memiliki data berjenis nominal.
3. Distribusi data adalah normal yang diketahui dari hasil uji normalitas.
4. Kelompok-kelompok yang akan diuji adalah homogen yang diketahui dari hasil uji homogenitas.

Selanjutnya interpretasi hasil anova *one way* dapat dilihat dari dua cara.

Penjelasan dari keduanya sebagai berikut:

1. Cara I, yaitu membandingkan F hitung dengan F tabel
 - $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima atau H_a ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan persepsi antara pemakai laporan keuangan, auditor, akuntan pendidik, dan mahasiswa akuntansi terhadap *expectation gap* dalam isu auditor dan proses audit / isu auditor dan proses audit / peran auditor / kompetensi dan independensi auditor / larangan pada KAP / komunikasi hasil audit antara pemakai laporan keuangan, auditor, akuntan pendidik, dan mahasiswa akuntansi.
 - $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 diterima atau H_a ditolak. Artinya terdapat perbedaan persepsi antara pemakai laporan keuangan, auditor, akuntan pendidik, dan mahasiswa akuntansi terhadap *expectation gap* dalam isu auditor dan proses audit / isu auditor dan proses audit / peran auditor / kompetensi dan independensi auditor / larangan pada KAP / komunikasi hasil audit antara pemakai laporan keuangan, auditor, akuntan pendidik, dan mahasiswa akuntansi

2. Cara II, yaitu melihat *probabilities values*

- *Probabilities value* > derajat keyakinan (0,05) maka H_0 diterima atau H_a ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan persepsi antara pemakai laporan keuangan, auditor, akuntan pendidik, dan mahasiswa akuntansi terhadap *expectation gap* dalam isu auditor dan proses audit / isu auditor dan proses audit / peran auditor / kompetensi dan independensi auditor / larangan pada KAP / komunikasi hasil audit antara pemakai laporan keuangan, auditor, akuntan pendidik, dan mahasiswa akuntansi.
- *Probabilities value* < derajat keyakinan (0,05) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat perbedaan persepsi antara pemakai laporan keuangan, auditor, akuntan pendidik, dan mahasiswa akuntansi terhadap *expectation gap* dalam isu auditor dan proses audit / isu auditor dan proses audit / peran auditor / kompetensi dan independensi auditor / larangan pada KAP / komunikasi hasil audit antara pemakai laporan keuangan, auditor, akuntan pendidik, dan mahasiswa akuntansi.

Selanjutnya, apabila uji F terbukti maka akan dilakukan uji beda t-test untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda. Interpretasi hasil dari uji beda t-test sebagai berikut:

2. Cara I, yaitu membandingkan t hitung dengan ttabel

- $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ maka H_0 diterima atau H_a ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan persepsi antara kelompok satu dengan kelompok lainnya terhadap *expectation gap* dalam isu auditor dan proses audit / isu auditor dan proses audit / peran auditor / kompetensi dan independensi

auditor / larangan pada KAP / komunikasi hasil audit antara pemakai laporan keuangan, auditor, akuntan pendidik, dan mahasiswa akuntansi.

- $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 diterima atau H_a ditolak. Artinya terdapat perbedaan persepsi antara kelompok satu dengan kelompok lainnya terhadap *expectation gap* dalam isu auditor dan proses audit / isu auditor dan proses audit / peran auditor / kompetensi dan independensi auditor / larangan pada KAP / komunikasi hasil audit antara pemakai laporan keuangan, auditor, akuntan pendidik, dan mahasiswa akuntansi.

2. Cara II, yaitu melihat *probabilities values*

- *Probabilities value* > derajat keyakinan (0,05) maka H_0 diterima atau H_a ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan persepsi antara kelompok satu dengan kelompok lainnya terhadap *expectation gap* dalam isu auditor dan proses audit / isu auditor dan proses audit / peran auditor / kompetensi dan independensi auditor / larangan pada KAP / komunikasi hasil audit antara pemakai laporan keuangan, auditor, akuntan pendidik, dan mahasiswa akuntansi.
- *Probabilities value* < derajat keyakinan (0,05) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat perbedaan persepsi antara kelompok satu dengan kelompok lainnya terhadap *expectation gap* dalam isu auditor dan proses audit / isu auditor dan proses audit / peran auditor / kompetensi dan independensi auditor / larangan pada KAP / komunikasi hasil audit antara pemakai laporan keuangan, auditor, akuntan pendidik, dan mahasiswa akuntansi.